

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
(STUDI KASUS PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN
2007 - 2011)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta untuk Memenuhi
Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh :

HONY ADHIANTOKO
09412144001

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2013**

PERSETUJUAN

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
(STUDI KASUS PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN
2007 - 2011)**

SKRIPSI

Oleh:

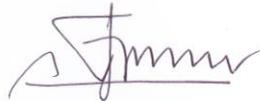
**HONY ADHIANTOKO
09412144001**

Telah disetujui dan disahkan
Pada tanggal 3 Mei 2013

Untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi
Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta

Disetujui

Dosen Pembimbing,



**Abdullah Taman, M.Si., Akt.
NIP. 19630624 199001 1 001**

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul:

**“ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BLORA
(STUDI KASUS PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN
2007 - 2011)”**

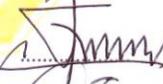
yang disusun oleh:

Hony Adhiantoko

NIM. 09412144001

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 14 Mei 2013 dan dinyatakan lulus.

DEWAN PENGUJI

Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Sukirno, Ph. D.	Ketua Penguji		3/6 '13
Abdullah Taman, M.si, Akt.	Sekretaris Penguji		5/6 '13
Moh. Djazari, M.Pd.	Penguji Utama		3/6 '13

Yogyakarta, 31 Mei 2013
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri
Yogyakarta

Dekan,



Drs. Sugihartono, M.Si.

NIP. 19560328 198303 1 002W

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : HONY ADHANTOKO

NIM : 09412144001

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Judul Skripsi : "ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BLORA (STUDI KASUS PADA DINAS
PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2007 - 2011)"

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan ataupun kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Yogyakarta, 3 Mei 2013

Penulis,



Hony Adhiantoko

NIM. 09412144001

MOTTO

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.

(QS. Ar Ra'd 13:11)

Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

(Ir. Soekarno)

You'll never walk alone (kamu tidak akan pernah berjalan sendirian).

(Liverpool Football Club)

Kebahagiaan bukanlah di saat kita memiliki kesempurnaan, namun ketika kita dapat menerima ketidaksempurnaan dengan tulus dan ikhlas.

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kehadiran ALLAH SwT., skripsi ini saya persembahkan untuk :

- ❖ Kedua orang tuaku bapak dan ibu yang telah mendidikku semenjak kecil hingga sampai sekarang ini, serta selalu mengiringi kehidupanku dengan penuh rasa kasih sayang, doa, dan kekuatan.
- ❖ Kakakku yang selalu mendukung dan memberi motivasi aku
- ❖ Almamaterku Universitas Negeri Yogyakarta

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
(STUDI KASUS PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN
2007 - 2011)**

Oleh :
Hony Adhiantoko
09412144001

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kinerja Keuangan DPPKAD Kabupaten Blora tahun 2007-2011 dilihat dari : (1) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, (2) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, (3) Rasio Efektivitas PAD, (4) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan (5) Rasio Keserasian.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Blora. Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan deskriptif kuantitatif dengan rumus: Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan Rasio Keserasian

Hasil analisis menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan DPPKAD Kabupaten Blora dilihat dari (1) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dikategorikan sangat kurang, karena rata-ratanya sebesar 6,57% (2) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pola hubungannya masih tergolong dalam pola hubungan instruktif karena rata-rata besarnya rasio ini sebesar 7,17% (3) Rasio Efektivitas PAD efektivitas kinerja keuangan Kabupaten Blora sudah efektif karena rata-rata efektivitasnya di atas 100% yaitu 108,71%. (4) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dikatakan kurang efisien karena rata-rata efisiensi keuangan daerah Kabupaten Blora sebesar 99,61% (5) Rasio Keserasian diketahui bahwa rata-rata belanja operasi daerah masih sangat tinggi yaitu 84,55% dibandingkan dengan rata-rata belanja modal sebesar 12,99% sehingga dapat dikatakan Pemerintah Daerah masih kurang memperhatikan pembangunan daerah.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan Rasio Keserasian.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SwT., atas semua limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul **“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007 - 2011)”** dengan lancar.

Di samping itu, bantuan dari berbagai pihak sangat berperan dalam proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof.Dr. Rochmat Wahab, M.Pd.,M.A., Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Dr.Sugiharsono, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
3. Abdullah Taman, M.Si.,Ak., Dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, masukan dan bimbingan selama penyusunan Tugas Akhir Skripsi.
4. M. Djazari, M.Pd., yang berkenan menjadi penguji utama Tugas Akhir Skripsi dan memberikan masukan kepada penulis.
5. Sukirno, Ph.D., yang berkenan menjadi ketua penguji dan memberikan masukan kepada penulis.
6. Segenap Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan bekal ilmu selama proses belajar di kampus.

7. Komang Gede Irawadi, SE,M.Si., Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora yang berkenan memberikan izin penelitian.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan dorongan serta bantuan selama penyusunan tugas akhir skripsi ini.

Semoga semua amal baik mereka dapat dicatat sebagai amalan yang terbaik oleh Allah SwT., Amin. Akhirnya harapan penelitian mudah-mudahan apa yang terkandung di dalam penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 3 Mei 2013
Penulis,

Hony Adhiantoko
NIM. 09412144001

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Pembatasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
BAB II. KAJIAN TEORI DAN PERTANYAAN PENELITIAN	9
A. Kajian Teori	9
1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	9
a. Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	9
b. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	12
c. Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	13

2.	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	14
a.	Laporan Realisasi Anggaran	14
b.	Neraca	17
c.	Catatan Atas Laporan Keuangan	17
3.	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	17
a.	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	18
b.	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	19
c.	Rasio Efektivitas PAD	22
d.	Rasio Efisiensi Keuangan Daerah	22
e.	Rasio Keserasian	23
B.	Penelitian yang Relevan	23
C.	Kerangka Berfikir	24
D.	Paradigma Penelitian	27
E.	Pertanyaan Penelitian	30
BAB III.	METODE PENELITIAN	31
A.	Lokasi dan Waktu Penelitian	31
B.	Desain Penelitian	31
C.	Subjek dan Objek Penelitian	31
D.	Definisi Operasional Variabel	31
E.	Teknik Pengumpulan Data	32
F.	Teknik Analisis	32
BAB IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A.	Data Umum	38
1.	Gambaran Umum Kabupaten Blora	38
a.	Kondisi Geografis	38
b.	Pemerintahan	39
2.	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Blora	40

a.	Sejarah Singkat	40
b.	Visi dan Misi	41
c.	Struktur Organisasi DPPKAD Kabupaten Blora	43
B.	Data Khusus	44
1.	APBD Kabupaten Blora Tahun 2007-2011	44
2.	Realisasi APBD Kabupaten Blora Tahun 2007-2009	46
C.	Analisis Data	48
1.	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	48
2.	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	50
3.	Rasio Efektivitas PAD	51
4.	Rasio Efisiensi Keuangan Daerah	52
5.	Rasio Keserasian	53
D.	Pembahasan	53
1.	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	55
2.	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	58
3.	Rasio Efektivitas PAD	62
4.	Rasio Efisiensi Keuangan Daerah	64
5.	Rasio Keserasian	66
E.	Jawaban Pertanyaan Penelitian	69
BAB V.	KESIMPULAN DAN SARAN	72
A.	Kesimpulan	72
B.	Saran	73
DAFTAR PUSTAKA		75
LAMPIRAN		77

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1	Skala Interval Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	19
2	Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah	21
3	Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan	23
4	Skala Interval Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	33
5	Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah	34
6	Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan	36
7	APBD Kabupaten Blora Tahun 2007-2009	44
8	APBD Kabupaten Blora Tahun 2010-2011	45
9	Realisasi APBD Kabupaten Blora Tahun 2007-2009 ...	46
10	Realisasi APBD Kabupaten Blora Tahun 2010-2011 ...	47
11	Penghitungan Rasio DDF DPPKAD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2007-2011	49
12	Penghitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah DPPKAD	50
13	Penghitungan Rasio Efektivitas PAD DPPKAD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2007-2011	52
14	Penghitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah DPPKAD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2007- 2011	53
15	Penghitungan Rasio Keserasian DPPKAD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2007-2011 (Belanja Operasi) ..	54
16	Penghitungan Rasio Keserasian DPPKAD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2007-2011 (Belanja Modal) ...	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
1	Paradigma Penelitian	29
2	Struktur Organisasi DPPKAD Kabupaten Blora	43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Pemberian Ijin Penelitian	75
2. Surat Bukti Penelitian	76
3. Laporan Realisasi Anggaran TA 2007	77
4. Laporan Realisasi Anggaran TA 2008	79
5. Laporan Realisasi Anggaran TA 2009.....	81
6. Laporan Realisasi Anggaran TA 2010	84
7. Laporan Realisasi Anggaran TA 2011	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga pemerintahan merupakan organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan bangsa dan negara. Lembaga pemerintahan dibentuk umumnya untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas. Sebagai organisasi nirlaba, lembaga pemerintahan mempunyai tujuan untuk menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan layanan tersebut di masa yang akan datang. Tujuan yang ingin dicapai biasanya ditentukan dalam bentuk kualitatif, misalnya peningkatan keamanan dan kenyamanan, mutu pendidikan, mutu kesehatan dan keamanan.

Sehubungan dengan banyaknya perubahan di bidang ekonomi, sosial dan politik dalam era reformasi ini, berdampak pada percepatan perubahan perilaku masyarakat, terutama yang berkaitan dengan tuntutan masyarakat akan adanya transparansi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah, demokratisasi dalam pengambilan keputusan, pemberian pelayanan oleh pemerintah yang lebih berorientasi pada kepuasan masyarakat dan penerapan hukum secara konsekuen. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sejak bulan Januari tahun 2001 yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Dengan tingkat kemandirian keuangan yang lebih besar berarti daerah tidak akan lagi sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan propinsi melalui dana perimbangan. Namun tidak berarti jika kemandirian keuangan daerah tinggi, maka daerah sudah tidak perlu lagi mendapatkan dana perimbangan. Dana perimbangan masih tetap diperlukan untuk mempercepat pembangunan di daerah.

Halim (2001: 167) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. Namun pada kenyataannya, sudah dua belas tahun sejak otonomi daerah diberlakukan, saat ini kemampuan keuangan beberapa pemerintah daerah masih sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat.

Beberapa permasalahan keuangan daerah yang dihadapi Kabupaten Blora antara lain: (1) ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi dari pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat baik dari sudut anggaran rutin, yaitu subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggaran pemerintah daerah, (2) rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil dibanding total penerimaan daerah, (3) kurangnya usaha dan kemampuan penerimaan daerah dalam pengelolaan dan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada. (4) Inefisiensi pemerintah daerah dalam melakukan belanja daerah.

Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja khususnya keuangan pemerintah daerah pada periode berikutnya. Adanya otonomi daerah tersebut mengakibatkan terjadinya desentralisasi sistem pemerintahan pada Kabupaten Blora, karena itu Pemerintah Kabupaten Blora sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah Kabupaten Blora berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Adanya penyelewengan-penyelewengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dilakukan

pemerintahan pada masa kekuasaan sebelumnya membuat masyarakat geram dan krisis kepercayaan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Blora, untuk itu masyarakat atau penduduk sebagai salah satu sumber daya pembangunan yang memegang dua peranan penting dalam pembangunan yaitu sebagai subjek atau perilaku sekaligus sebagai objek pembangunan menginginkan adanya transparansi anggaran keuangan yang ada pada Pemerintah Kabupaten Blora, sehingga masyarakat atau penduduk juga dapat memantau kinerja Pemerintah Kabupaten Blora apakah dapat berjalan dengan baik atau tidak.

Analisis kinerja keuangan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Blora adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan DPPKAD Kabupaten Blora dalam bidang keuangan untuk kurun waktu tertentu. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “*Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (Studi kasus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora) tahun 2007-2011.*”

B. Identifikasi Masalah

Ada masalah politis saat berbicara mengenai prioritas alokasi dan masalah ekonomi ketika bicara sumber pendanaannya. Menganalisa keuangan di Indonesia mengungkapkan beberapa permasalahan di bidang keuangan daerah yang dihadapi beberapa pemerintah daerah selama ini,

khususnya pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Blora yaitu:

- a. Ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi pemerintah pusat yang tercermin dari besarnya bantuan pusat baik dari sudut anggaran rutin yaitu melalui subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggaran pembangunan yaitu bantuan pembangunan daerah.
- b. Rendahnya kemampuan daerah untuk menggali sumber asli daerah yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil dibandingkan dengan total penerimaan daerah.
- c. Kurangnya usaha dan kemampuan pemerintah daerah mengelola dan menggali sumber pendapatan yang ada.
- d. Inefisiensi pemerintah daerah dalam melakukan belanja daerah.

Hasil analisis rasio keuangan dalam penelitian ini selanjutnya digunakan untuk tolok ukur dalam : menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, melihat kinerja keuangan jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, melihat kinerja keuangan jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD, melihat kinerja keuangan jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan melihat kinerja keuangan jika dilihat dari Rasio Pajak Daerah terhadap PAD. Dengan digunakannya analisis keuangan tersebut maka akan memberikan suatu hasil perbandingan kinerja keuangan dari tahun-tahun sebelumnya, di mana nantinya akan menggambarkan kondisi Kinerja Keuangan pada DPPKAD Kabupaten Blora.

C. Pembatasan Masalah

Mengingat begitu banyak permasalahan yang timbul, maka diperlukan pembatasan masalah untuk menghindari berbagai kesalahan persepsi yang berkaitan dengan penelitian. Oleh karena itu penelitian ini dibatasi pada “Analisis kinerja keuangan yang dilihat dari aspek Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, serta Rasio Keserasian di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora (DPPKAD) pada tahun 2007 sampai dengan 2011”.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kinerja keuangan DPPKAD Kabupaten Blora jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi ?
2. Bagaimana kinerja keuangan DPPKAD Kabupaten Blora jika dilihat dari Rasio Kemandirian ?
3. Bagaimana kinerja keuangan DPPKAD Kabupaten Blora jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD ?
4. Bagaimana kinerja keuangan DPPKAD Kabupaten Blora jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah ?
5. Bagaimana kinerja keuangan DPPKAD Kabupaten Blora jika dilihat dari Rasio Keserasian ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian yang dilakukan ini adalah untuk mengetahui :

1. Kinerja keuangan DPPKAD Kabupaten Blora jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi.
2. Kinerja keuangan DPPKAD Kabupaten Blora jika dilihat dari Rasio Kemandirian
3. Kinerja keuangan DPPKAD Kabupaten Blora jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD.
4. Kinerja keuangan DPPKAD Kabupaten Blora jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.
5. Kinerja keuangan DPPKAD Kabupaten Blora jika dilihat dari Rasio Keserasian.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam menganalisis kinerja keuangan pada DPPKAD Kabupaten Blora dengan menerapkan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, serta Rasio Keserasian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritik tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Keuangan DPPKAD Kabupaten Blora ditinjau dari teori

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, serta Rasio Keserasian untuk Menganalisis Kinerja Keuangan DPPKAD Kabupaten Blora.

2. Manfaat Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi atau sumbangan pemikiran Pemerintah Daerah didalam menganalisis Kinerja Keuangan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada perkembangan zaman yang semakin kompetitif.
- b) Bagi peneliti, penelitian ini merupakan media untuk belajar memecahkan masalah secara ilmiah dan pengaruh Penerapan teori Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, serta Rasio Keserasian untuk menganalisis Kinerja Keuangan DPPKAD Kabupaten Blora.
- c) Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan tambahan pengetahuan dan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN PERTANYAAN PENELITIAN

A. Kajian Teori

1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

a. Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Hendro Sumarjo,2010).

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Ibnu Syamsi,1986: 199).

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi

anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran.

Organisasi sektor publik yang salah satunya pemerintah merupakan organisasi yang bertujuan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi dan sebagainya. Pelayanan publik diberikan kepada masyarakat yang merupakan salah satu *stakeholder* organisasi sektor publik, oleh karena itu Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada DPRD selaku wakil rakyat di pemerintahan. Dengan asumsi tersebut dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah membutuhkan sistem pengukuran kinerja yang bertujuan untuk membantu manajer publik untuk menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja sendiri dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi. Kinerja yang baik bagi Pemerintah Daerah dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh Pemerintah Daerah dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efektif dan efisien.

Ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri (Ibnu Syamsi, 1986: 99).

1) Kemampuan struktural organisasinya

Struktur organisasi Pemerintah Daerah harus mampu menampung segala aktivitas dan tugas tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya, jumlah unit-unit beserta macamnya cukup mencerminkan kebutuhan, pembagian tugas wewenang dan tanggung jawab yang cukup jelas.

2) Kemampuan aparatur Pemerintah Daerah

Aparat Pemerintah Daerah harus mampu menjalankan tugasnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Keahlian, moral, disiplin dan kejujuran saling menunjang tercapainya tujuan yang diidam-idamkan oleh daerah.

3) Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat

Pemerintah Daerah harus mampu mendorong agar masyarakat mau berperan serta kegiatan pembangunan.

4) Kemampuan Keuangan Daerah.

Pemerintah Daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai pelaksanaan pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri. Untuk itu kemampuan keuangan daerah harus mampu mendukung terhadap pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

b. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu (Mardiasmo, 2002: 121) :

- 1) Memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah.
- 2) Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
- 3) Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk digunakan sebagai tolok ukur dalam (Abdul Halim 2007:230):

- 1) Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
- 2) Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
- 3) Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
- 4) Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
- 5) Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

c. Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah harus mencakup pengukuran Kinerja Keuangan. Hal ini terkait dengan tujuan organisasi Pemda. Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah meliputi :

1) Indikator Masukan (Inputs)

Indikator Masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Misalnya : jumlah dana yang dibutuhkan, jumlah pegawai yang dibutuhkan, jumlah infrastruktur yang ada, dan jumlah waktu yang digunakan.

2) Indikator Proses (Process)

Indikator Proses adalah merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Misalnya : ketaatan pada peraturan perundangan dan rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa.

3) Indikator Keluaran (Output)

Indikator Keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau nonfisik. Misalnya : jumlah produk atau jasa yang dihasilkan dan ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa.

4) Indikator Hasil (Outcome)

Indikator Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Misalnya : tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan dan produktivitas para karyawan atau pegawai

5) Indikator Manfaat (Benefit)

Indikator Manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Misalnya : tingkat kepuasan masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat.

6) Indikator Dampak (Impact)

Indikator Dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Misalnya : peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat.

2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, komponen-komponen yang terdapat dalam suatu laporan keuangan pokok adalah :

- a. Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, aplikasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Dalam

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan unsur yang dicakup dalam Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari :

1) Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemda, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemda.

Pendapatan dibagi menjadi 3 kategori :

- a) Pendapatan asli daerah, merupakan semua penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.
- b) Dana perimbangan, merupakan dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan belanja negara yang di alokasikan pada daerah untuk membiyai kebutuhan dananya.
- c) Lain-lain pendapatan yang sah, adalah pendapatan lain-lain yang dihasilkan dari dana bantuan dan dana penyeimbang dari Pemerintah Pusat.

2) Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, dan tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh Pemda. Belanja dibagi menjadi

3 jenis yaitu :

- a) Belanja aparatur daerah, merupakan belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat tetapi dirasakan secara

langsung oleh aparatur, contohnya pembelian kendaraan dinas, pembelian bangunan gedung dan lain sebagainya.

b) Belanja pelayanan publik, merupakan belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum, contohnya pembangunan jembatan dan jalan raya dan sebagainya.

c) Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan

3) Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemda terutama dimaksudkan untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan dikelompokkan menjadi :

a) Sumber penerimaan daerah, yaitu :

- Sisa lebih anggaran penerimaan tahun lalu.
- Penerimaan pinjaman dan obligasi.
- Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan.
- Transfer dari dana cadangan.

b) Sumber pengeluaran daerah, yaitu :

- Pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo.
- Penyertaan modal.
- Transfer ke dana cadangan.
- Sisa lebih anggaran tahun sekarang.

- b. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
 - c. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atau nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.
3. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan atas sumber daya yang dihimpun dari masyarakat sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Abdul Halim, 2007: 231).

Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan Rasio Keuangan Pemerintah Daerah (Abdul Halim, 2007: 232) adalah :

- 1) Pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya.

- 2) Pemerintah pusat/provinsi sebagai masukan dalam membina pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
- 3) Masyarakat dan kreditur, sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemerintah daerah, bersedia memberi pinjaman maupun membeli obligasi.

Dengan demikian setiap Pemerintah Daerah untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerahnya menggunakan beberapa Rasio Kinerja Keuangan Daerah yang antara lain : Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Dearah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan Rasio Keserasian.

a. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Derajat Desentralisasi Fiskal, khususnya komponen PAD dibandingkan dengan Total Pendapatan Daerah, menurut hasil penelitian Tim Fisipol UGM menggunakan skala interval seperti pada tabel berikut :

Tabel 1. Skala interval Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal. %	Kemampuan Keuangan Daerah
00,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Cukup
30,01 – 40,00	Sedang
40,01 – 50,00	Baik
> 50,00	Sangat baik

Sumber : Anita Wulandari (2001 : 22)

Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$DDF = \frac{PADt}{TPDt} \times 100\%$$

Keterangan :

DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal

PADt = Total Pendapatan Asli Daerah tahun t

TPDt = Total Pendapatan Daerah tahun t

b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak

dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer) antara lain : Bagi hasil pajak, Bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, Dana alokasi umum dan Alokasi khusus, Dana darurat dan pinjaman (Widodo, 2001 : 262). Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah :

$$\text{RKKD} = \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan Ketergantungan daerah terhadap Pendapatan Transfer (sumber data ekstern). Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber : Abdul Halim (2007:169).

- (1) Pola hubungan instruktif, di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- (2) Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- (3) Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- (4) Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

c. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Kriteria Rasio Efektivitas menurut Mohammad Mahsun (2009), adalah :

- 1) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti tidak efektif
- 2) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efektivitas berimbang.
- 3) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti efektif.

d. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik.

Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan target penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya (Abdul Halim 2007:234). Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah :

$$\text{REKD} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi
100% keatas	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
60%-80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber : Abdul Halim (2007:234)

e. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Operasi dan Belanja Modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan

untuk Belanja Operasi berarti persentase Belanja Modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana, Rasio Kesenjangan itu dapat diformulasikan sebagai berikut (Abdul Halim 2007:236):

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya Rasio Belanja Operasi maupun Modal terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian, sebagai daerah di negara berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Oleh karena itu, rasio belanja pembangunan yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah.

B. Penelitian yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriyah Agustin (2007) dalam skripsinya yang berjudul “Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar

ditinjau dari Rasio APBD. Ada 2 metode yang digunakan yaitu metode *Time Series* yang terdiri dari Rasio Kemandirian, Rasio Aktivitas, dan Rasio Pertumbuhan. Metode *Cross Section* terdiri dari beberapa rasio seperti : Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD, Rasio *Debt Service Coverage Ratio*. Kemudian dari penelitian ini disimpulkan bahwa berdasar Rasio Keuangan APBD maka Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah baik jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan dan Rasio DSCR. Namun dapat dikatakan kurang baik apabila dilihat dari Rasio Kemandirian, Rasio Aktifitas dan Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi PAD. Pemerintah daerah belum bisa menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien karena masih banyak rasio-rasio yang menunjukkan kurangnya Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar dalam mengelola sumber dana yang dimilikinya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah metode penelitiannya yaitu menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Perbedaannya terletak pada waktu dan lokasi penelitian dimana penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2007 di Kabupaten Blitar, Jawa Timur sedangkan penelitian penulis dilaksanakan di Kabupaten Blora, Jawa Tengah pada tahun 2013.

2. Penelitian yang dilakukan Sri Wahyuni (2008) yang disusun dalam sebuah skripsi “Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sragen Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan di Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah dengan

menggunakan beberapa rasio seperti: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Indeks Kemampuan Rutin, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan tahun 2002-2006. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah rata-rata kemampuan keuangan Kabupaten Sragen masih sangat rendah. Berdasarkan Rasio Kemandirian masih tergolong instruktif yang berarti kemampuan pemerintah Kabupaten Sragen dalam hal memenuhi kebutuhan dana untuk membiayai pembangunan daerah serta memberikan pelayanan daerah masih sangat rendah dan masih tergantung bantuan dari pusat. Begitupun juga berdasarkan rasio lainnya yang rata-rata kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sragen masih sangat rendah, kecuali Rasio Pertumbuhan yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya ditandai dengan naiknya pajak dan retribusi tiap tahunnya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah persamaan dalam hal metode pengumpulan data dalam penelitiannya. Perbedaannya adalah waktu dan lokasi penelitian dimana penelitian ini dilakukan pada tahun 2008 di Kabupaten Sragen.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Widada (2012) yang disusun dalam sebuah skripsi “Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klaten”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Kinerja Keuangan DPPKA Kabupaten Klaten jika dilihat dari Rasio Efektivitas. Kinerja Keuangan DPPKA Kabupaten Klaten jika dilihat dari Rasio

Pajak Daerah terhadap PAD. Kinerja Keuangan DPPKA Kabupaten Klaten jika dilihat dari Rasio Kemandirian. Perkiraan Kinerja Keuangan melalui Analisis *Trend* untuk Rasio Efektivitas, Rasio Pajak Daerah terhadap PAD, Rasio Kemandirian pada DPPKA Kabupaten Klaten pada tahun 2006 sampai dengan 2010. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Sri Widada menunjukkan Kinerja Keuangan Kabupaten Klaten dari tahun 2006 sampai dengan 2010 cenderung tidak stabil. Tingkat kemandirian Kabupaten Klaten dihitung sangat rendah dan tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat baik propinsi maupun pusat masih tinggi. Namun berdasarkan Analisis *Trend* yaitu perkiraan Kinerja Keuangan Kabupaten Klaten diperkirakan cenderung baik dan naik dari tahun-tahun sebelumnya terutama mengenai Rasio Pajak Daerah terhadap PAD dan Rasio Kemandirian untuk tahun 2011 dan 2012. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah jenis penelitian dan metode pengumpulan datanya di mana keduanya sama-sama menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan pengumpulan data nya menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan penelitian kepustakaan.

C. Kerangka Berfikir

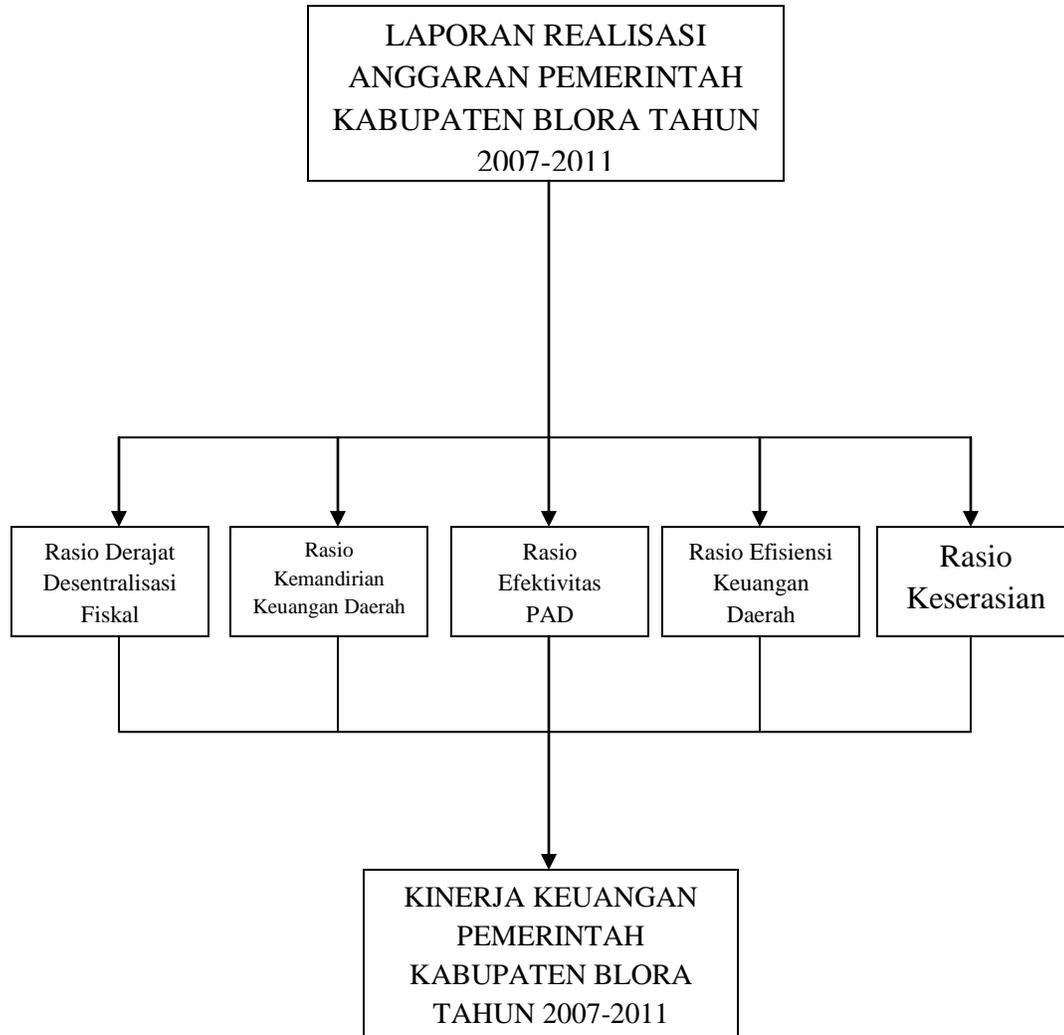
Menganalisis Kinerja Keuangan DPPKAD Kabupaten Blora adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan DPPKAD Kabupaten Blora dalam bidang keuangan untuk kurun waktu tertentu. Di bawah ini ada lima macam rasio yang digunakan oleh

peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan DPPKAD Kabupaten Blora :

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total Pendapatan Daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya.

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas, PAD maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal.

D. Paradigma Penelitian



Gambar 1. Paradigma Penelitian

E. Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kinerja Keuangan DPPKAD Kabupaten Blora jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal ?
2. Bagaimana Kinerja Keuangan DPPKAD Kabupaten Blora jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ?
3. Bagaimana Kinerja Keuangan DPPKAD Kabupaten Blora jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD ?
4. Bagaimana Kinerja Keuangan DPPKAD Kabupaten Blora jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah ?
5. Bagaimana Kinerja Keuangan DPPKAD Kabupaten Blora jika dilihat dari Rasio Keserasian ?

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Blora yang berlokasi di Jalan Pemuda no. 16 A, Kecamatan Kota Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah pada tanggal 7 Januari sampai dengan 19 Februari 2013.

B. Desain Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, penelitian ini merupakan penelitian deskripsi kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Kinerja Keuangan pada DPPKAD Kabupaten Blora jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan Rasio Keserasian.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini ialah DPPKAD Kabupaten Blora dan Objek yang diteliti yaitu Laporan Realisasi Anggaran tahun 2007-2011.

D. Definisi Operasional Variabel

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur,

kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Hendro Sumarjo,2010).

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan dengan pencarian data sekunder dengan mengumpulkan data dengan cara mempelajari catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang ada pada perusahaan atau instansi yang diteliti dengan menggunakan metode dokumentasi.

Metode Dokumentasi ini melakukan pengumpulan data dari DPPKAD Kabupaten Blora berupa data umum dan data khusus. Data umum berupa :

1. Gambaran umum Kabupaten Blora.
2. Gambaran umum DPPKAD Kabupaten Blora.

Dan data khusus berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Blora tahun anggaran 2007-2011.

F. Teknik Analisis

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan maka teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan

masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun tolok ukur yang akan digunakan dalam teknik analisis ini adalah:

1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat Desentralisasi Fiskal atau Otonomi Fiskal daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan. Derajat Desentralisasi Fiskal, khususnya komponen PAD dibandingkan dengan TPD, menurut hasil penelitian Tim Fisipol UGM menggunakan skala interval sebagaimana terlihat dalam sebagai berikut:

Tabel 4. Skala interval Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal. %	Kemampuan Keuangan Daerah
00,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Cukup
30,01 – 40,00	Sedang
40,01 – 50,00	Baik
> 50,00	Sangat baik

Sumber : Anita Wulandari (2001 : 22)

Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$DDF = \frac{PADt}{TPDt} \times 100\%$$

Keterangan :

DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal

PAD_t = Total Pendapatan Asli Daerah tahun t

TPD_t = Total Pendapatan Daerah tahun t

2. Rasio Kemandirian

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Formula rasio kemandirian menurut Mahsun (2009) adalah sebagai berikut:

$$\text{RKKD} = \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Tabel 5. Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber : Abdul Halim (2007:169).

Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi Rasio Kemandirian

Keuangan Daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi.

3. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Kriteria Rasio Efektivitas PAD menurut Mahsun (2009), adalah :

- a) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti tidak efektif
- b) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efektivitas berimbang.
- c) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti efektif.

4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintahan daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila

rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintahan semakin baik. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah :

$$\text{REKD} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 6 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi
100% keatas	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
60%-80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber : Abdul Halim (2007:234)

5. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi berarti persentase belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana, rasio keserasian itu dapat diformulasikan sebagai berikut (Abdul Halim 2007:236):

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya Rasio Belanja Operasi maupun Rasio Belanja Modal terhadap Belanja Daerah yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Umum

1. Gambaran Umum Kabupaten Blora

a. Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Blora terletak di antara 111°016' s/d 111°338' Bujur Timur dan diantara 6°528' s/d 7°248' Lintang Selatan. Secara administratif terletak di wilayah paling ujung (bersama Kabupaten Rembang) disisi timur Propinsi Jawa Tengah. Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 57 km dan jarak terjauh dari utara ke selatan 58 km. Secara administratif di sebelah utara Kabupaten Blora berbatasan dengan Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati, di sebelah timur dengan Kabupaten Bojonegoro (Jawa Timur), di sebelah selatan dengan Kabupaten Ngawi (Jawa Timur) dan di sebelah barat dengan Kabupaten Grobogan.

Luas wilayah Kabupaten Blora adalah, 1.820,59 km² (182058,3077) atau sekitar 5,5 persen luas wilayah Propinsi Jawa Tengah. Kabupaten Blora memiliki wilayah dengan ketinggian terendah 30-280 dpl dan tetinggi 500 dpl. Kabupaten Blora diapit oleh Pegunungan Kendeng Utara dan Selatan sengan susunan tanah 56 persen gromosol, 39

persen mediteran dan 5 persen aluvial. Kabupaten Blora dengan luas wilayah 1820,59 Km², terbesar penggunaan arealnya adalah sebagai hutan yang meliputi hutan negara dan hutan rakyat, yakni 49,66 %, tanah sawah 25,38 % dan sisanya digunakan sebagai pekarangan, tegalan, waduk, perkebunan rakyat dan lain-lain yakni 24,96 % dari seluruh penggunaan lahan.. Untuk jenis pengairan di Kabupaten Blora, 12 kecamatan telah memiliki saluran irigasi teknis, kecuali Kecamatan Jati, Randublatung, Kradenan, dan Kecamatan Japah yang masing-masing memiliki saluran irigasi setengah teknis dan tradisional. Waduk sebagai sumber pengairan baru terdapat di tiga Kecamatan Tunjungan, Blora, dan Todanan di samping dam-dam penampungan air di Kecamatan Ngawen, Randublatung, Banjarejo, Jati, Jiken.

Pertanian merupakan sektor utama perekonomian di Kabupaten Blora. Pada subsektor kehutanan, Blora adalah salah satu daerah utama penghasil kayu jati berkualitas tinggi di Pulau Jawa. Kabupaten Blora juga memiliki kandungan minyak bumi yang melimpah, yaitu daerah Blok Cepu yang ditemukan cadangan minyak bumi sebanyak 250 juta barel.

b. Pemerintahan

Jumlah kecamatan di Kabupaten Blora adalah 16 kecamatan yang terdiri 271 desa dan 24 kelurahan. Beberapa kecamatan tersebut antara lain : Blora, Todanan, Kunduran, Japah, Ngawen, Tunjungan, Banjarejo,

Jepon, Jiken, Sambong, Bogorejo, Cepu, Kedungtuban, Randublatung, Kradenan, dan Jati. Keseluruhannya terdiri dari 941 dusun, 1.204 RW dan 5.429 RT. Enam kecamatan memiliki wilayah kelurahan (Randublatung, Cepu, Jepon, Blora, Ngawen, dan Kunduran). Kecamatan Ngawen memiliki desa/kelurahan terbanyak (27 desa dan 2 kelurahan) sedangkan Kecamatan Sambong dan Kradenan memiliki desa/kelurahan paling sedikit masing-masing dengan 10 desa.

2. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)

Blora

a. Sejarah Singkat

Sebagaimana diketahui bahwa dengan telah terbitnya PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka dilingkungan Pemerintah Daerah seluruh Indonesia, khususnya Pemerintah Kabupaten telah dirumuskan untuk membentuk Lembaga atau Institusi baru. Institusi ini dalam bentuk Dinas Daerah dimana posisinya berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Di Blora sendiri telah ditentukan mengenai perumpunan urusan pemerintahannya dimana sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) huruf L dari PP No. 41 Tahun 2007 untuk urusan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah harus berbentuk Dinas, dan sesuai dengan Permendagri No 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan

Organisasi Perangkat Daerah, harus disebut Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bloro.

Dengan demikian lembaga DPPKAD Kabupaten Bloro adalah lembaga yang baru pertama kali ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bloro, yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bloro Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bloro, telah berdiri sejak tanggal 19 Nopember 2008. Namun demikian secara riil baru melakukan tugasnya pada tanggal 14 Februari 2009, sejak serah terima dari lembaga / institusi lama, yang disebut sebagai Dipenda (Dinas Pendapatan Daerah) Kabupaten Bloro. Dengan demikian, maka tidak ada kaitan sama sekali antara Dinas yang lama dengan Dinas Daerah yang baru. Secara Implisit, DPPKAD merupakan Unit Kerja yang di dalamnya mencakup bidang Pekerjaan Pendapatan Daerah, Keuangan Daerah, dan Aset Daerah sesuai dengan PP No. 41 tahun 2007 tadi.

b. Visi dan Misi

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, DPPKAD Kabupaten Bloro mempunyai Visi dan Misi yang merupakan pemandu arah, guna menciptakan persatuan dan kesatuan gerak bersama bagi seluruh jajaran personil pada DPPKAD Kabupaten Bloro, dalam pelaksanaan tugas dan tercapainya tujuan organisasi.

1) Visi

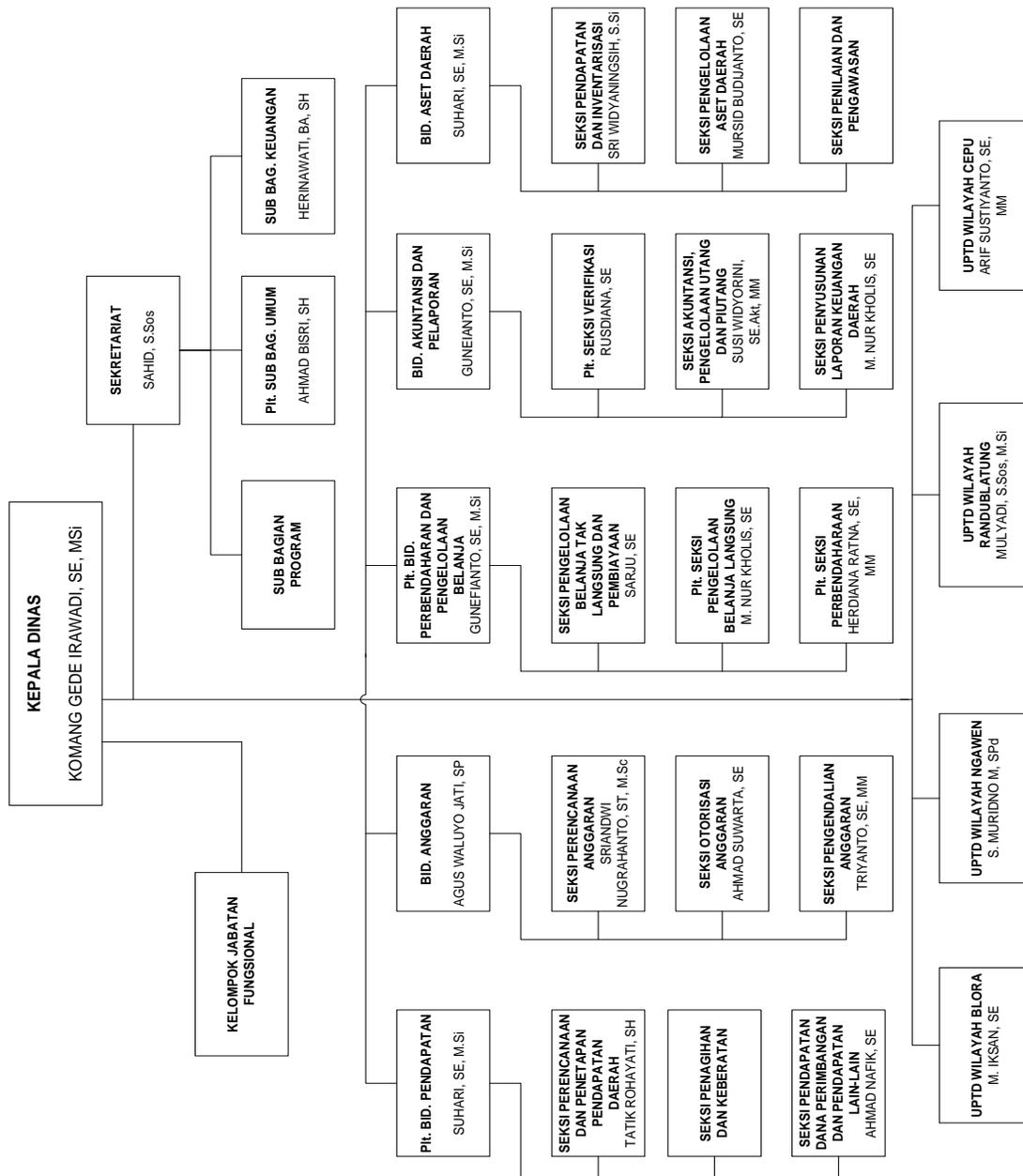
“Meningkatkan Pendapatan Daerah dan Pendayagunaan Aset Yang Optimal, Disertai Manajemen Keuangan yang Profesional dan Akuntabel akan Memperkuat Otonomi Daerah”

2) Misi

Misi yang digunakan dalam merealisasikan Visinya adalah:

- a) Menyelenggarakan / mengupayakan pembinaan manajemen dan perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- b) Menyusun proses Penatausahaan Keuangan Daerah dan Pendapatan Daerah, serta Aset Daerah.
- c) Mewujudkan iklim yang kondusif dan transparan dalam penyelenggaraan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah dan Aset Daerah
- d) Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah dibidang Perpajakan maupun Keuangan Daerah serta pemanfaatan Aset Daerah
- e) Melakukan pengendalian, pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap rangkaian proses peningkatan Pendapatan Daerah maupun Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pendayagunaan Aset Daerah.

c. Struktur Organisasi DPPKAD Kabupaten Blora



Gambar 2. Struktur Organisasi DPPKAD Kabupaten Blora

B. Data Khusus

1. APBD Kabupaten Blora Tahun 2007-2011

Tabel 7. APBD Kabupaten Blora Tahun 2007-2009 (Dalam ribuan Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		
		2007	2008	2009
A	PENDAPATAN	611.148.967	704.762.520	713.980.086
1	Pendapatan Asli Daerah	30.732.453	45.337.229	50.000.000
2	Pendapatan Transfer	570.812.802	647.046.390	663.080.088
3	Lain-lain Pendapatan Yang sah	9.603.712	12.338.901	900.000
B	BELANJA	637.081.779	841.776.344	873.450.161
1	Belanja Operasi	471.425.792	628.457.825,05	790.431.147,8
2	Belanja Modal	131.884.348	158.503.018,95	81.769.013,2
3	Belanja Tak Terduga	2.225.413	2.000.000	1.250.000
4	Transfer	31.546.226	52.817.500	0
	Surplus/Defisit	25.932.812	137.015.824	159.470.075

Sumber Data : DPPKAD Kabupaten Blora

Tabel 8. APBD Kabupaten Blora Tahun 2010-2011 (Dalam ribuan Rupiah)

No.	Uraian	Tahun	
		2010	2011
A	PENDAPATAN	818.022.937	987.415.009
1	Pendapatan Asli Daerah	56.500.000	58.400.000
2	Pendapatan Transfer	740.569.483	897.032.669
3	Lain-lain Pendapatan Yang sah	20.953.454	31.982.340
B	BELANJA	893.724.954,74	1.072.010.045,49
1	Belanja Operasi	772.248.171,49	842.609.486,04
2	Belanja Modal	119.795.583,25	226.667.369,45
3	Belanja Tak Terduga	1.681.200	2.733.190
4	Transfer	0	0
	Surplus/Defisit	75.702.017,74	84.595.036,49

Sumber Data : DPPKAD Kabupaten Blora

2. Realisasi APBD Kabupaten Blora Tahun 2007-2011

Tabel 9. Realisasi APBD Kabupaten Blora Tahun 2007-2009 (Dalam ribuan Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		
		2007	2008	2009
A	PENDAPATAN	643.901.838,06	711.701.565,96	722.238.085,65
1	Pendapatan Asli Daerah	41.620.458,14	50.203.192,75	49.696.650,71
2	Pendapatan Transfer	592.594.398,47	615.642.427,41	672.541.434,94
3	Lain-lain Pendapatan Yang sah	9.686.981,45	13.835.226,5	0
B	BELANJA	568.072.452,18	769.142.354,78	804.635.000,32
1	Belanja Operasi	425.300.060,39	577.494.559,22	733.757.544,27
2	Belanja Modal	112.130.944,05	141.454.931,62	69.902.568,62
3	Belanja Tak Terduga	256.978,67	25.500	974.887,44
4	Transfer	30.384.469,08	50.167.363,94	0
	Surplus/Defisit	75.829.385,88	57.440.787,82	82.396.914,68

Sumber Data : DPPKAD Kabupaten Blora

Tabel 10. Realisasi APBD Kabupaten Blora Tahun 2010-2011 (Dalam ribuan Rupiah)

No.	Uraian	Tahun	
		2010	2011
A	PENDAPATAN	809.229.173,42	1.007.775.882,84
1	Pendapatan Asli Daerah	47.087.584,06	67.021.769,9
2	Pendapatan Transfer	743.695.142,36	912.112.701,19
3	Lain-lain Pendapatan Yang sah	18.446.447	28.641.411,75
B	BELANJA	797.007.475,76	925.821.278,06
1	Belanja Operasi	743.451.499,46	818.040.151,15
2	Belanja Modal	53.846.801,3	105.829.479,21
3	Belanja Tak Terduga	279.175	1.951.647,7
4	Transfer	0	0
	Surplus/Defisit	12.151.697,67	81.954.604,77

Sumber Data : DPPKAD Kabupaten Blora

Selanjutnya Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Blora tahun 2007-2011 dapat dilihat pada Lampiran 3-7 halaman 80-90.

C. Analisis Data

Analisis Kinerja Keuangan DPPKAD Kabupaten Blora dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan DPPKAD Kabupaten Blora dalam bidang keuangan untuk kurun waktu 2007-2011. Rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan DPPKAD Kabupaten Blora pada penelitian ini adalah: Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan Rasio Keserasian. Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Blora yang didapat dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Blora. Dari data tersebut nantinya dapat diketahui Kinerja Keuangan Kabupaten Blora. Adapun hasil dari Analisis Rasio tersebut adalah :

1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{DDF} = \frac{\text{PADt}}{\text{TPDt}} \times 100\%$$

Keterangan :

DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal

PADt = Total Pendapatan Asli Daerah tahun t

TPDt = Total Pendapatan Daerah tahun t

Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah

Hasil dari perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dilihat pada tabel 9. di bawah ini :

Tabel 11. Penghitungan Rasio DDF DPPKAD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2007-2011

Tahun Anggaran	PAD (Rp)	TPD (Rp)	DDF (%)	Kemampuan Keuangan
2007	41.620.458.144,00	643.901.838.064,00	6,46	Sangat Kurang
2008	50.203.192.750,00	711.701.566.955,00	7,05	Sangat Kurang
2009	49.696.650.709,00	722.238.085.646,00	6,88	Sangat Kurang
2010	47.087.584.059,00	809.229.173.421,00	5,82	Sangat Kurang
2011	67.022.069.902,00	1.007.776.182.838,00	6,65	Sangat Kurang

Sumber Data : DPPKAD Kabupaten Blora (diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 11. di atas dapat dilihat bahwa Kinerja Keuangan DPPKAD Kabupaten Blora jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dikategorikan Sangat Kurang. Dimulai pada tahun 2007 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada DPPKAD Kabupaten Blora sebesar 6,46%. Pada tahun 2008 mengalami kenaikan menjadi 7,05%, tahun berikutnya terjadi lagi penurunan menjadi 6,88%. Terjadi penurunan lagi pada tahun 2010 menjadi 5,82%, namun terjadi kenaikan di tahun 2011 menjadi 6,65%. Meskipun mengalami kenaikan pada tahun terakhir namun seluruhnya dapat dikatakan kemampuan keuangan DPPKAD Kabupaten Blora masih sangat kurang, karena masih berada dalam skala interval 00,00-10,00%.

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{RKKD} = \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Hasil dari perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel 12. di bawah ini :

Tabel 12. Penghitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah DPPKAD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2007-2011

Tahun Anggaran	PAD (Rp)	Bantuan Pemerintah Pusat atau Provinsi dan Pinjaman (Rp)	RKKD (%)	Pola Hubungan
2007	41.620.458.144,00	592.594.398.466,00	7,02	instruktif
2008	50.203.192.750,00	647.663.147.705,00	7,75	instruktif
2009	49.696.650.709,00	672.541.434.937,00	7,39	instruktif
2010	47.087.584.059,00	743.695.142.362,00	6,33	instruktif
2011	67.022.069.902,00	912.112.701.186,00	7,35	instruktif

Sumber Data : DPPKAD Kabupaten Blora (diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 12. di atas kemampuan keuangan DPPKAD Kabupaten Blora tergolong masih sangat rendah dan pola hubungannya termasuk pola hubungan instruktif dimana peranan

pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Nilai terendah terjadi pada tahun 2010 dimana nilainya sebesar 6,33% dan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 7,75%. Sedangkan tahun tahun lainnya yaitu tahun 2007, 2009, dan 2011 masing-masing sebesar : 7,02%, 7,39%, dan 7,35%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pihak ekstern (terutama bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi) masih sangat tinggi.

3. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

Hasil dari perhitungan Rasio Efektivitas PAD dapat dilihat pada tabel 13. di bawah ini :

Tabel 13. Penghitungan Rasio Efektivitas PAD DPPKAD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2007-2011

Tahun Anggaran	Anggaran PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	REPAD (%)	Kriteria
2007	30.732.453.000,00	41.620.458.144,00	135,43	Efektif
2008	45.377.729.000,00	50.203.192.750,00	110,63	Efektif
2009	50.000.000.000,00	49.696.650.709,00	99,39	Tidak Efektif
2010	56.500.000.000,00	47.087.584.059,00	83,34	Tidak Efektif
2011	58.400.000.000,00	67.022.069.902,00	114,76	Efektif

Sumber Data : DPPKAD Kabupaten Blora (diolah)

Berdasarkan perhitungan pada tabel 13. di atas dapat diketahui bahwa Efektivitas Keuangan DPPKAD Kabupaten Blora pada tahun 2009 dan 2010 tidak efektif, karena nilai yang diperoleh masih di bawah 100% yaitu 99,39% dan 83,34%. Untuk tahun 2007, 2008, dan 2011 sudah efektif karena nilai yang diperoleh sudah lebih dari 100% yaitu 135,43%, 110,63%, dan 114,76%.

4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{REKD} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Hasil dari perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel 14. di bawah ini :

Tabel 14. Penghitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah DPPKAD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2007-2011

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja (Rp)	Realisasi Pendapata (Rp)	REKD (%)	Kriteria
2007	568.072.452.180,00	643.901.838.064,00	88,22	Cukup Efisien
2008	769.142.354.777,00	711.701.566.955,00	108,07	Tidak Efisien
2009	804.635.000.321,00	722.238.085.646,00	111,41	Tidak Efisien
2010	797.077.475.755,00	809.229.173.421,00	98,49	Kurang Efisien
2011	925.821.578.064,00	1.007.776.182.838,00	91,87	Kurang Efisien

Sumber Data : DPPKAD Kabupaten Blora (diolah)

Berdasarkan perhitungan pada tabel 14. di atas Efisiensi Keuangan Daerah DPPKAD Kabupaten Blora pada tahun 2007 tergolong cukup efisien karena interval efisiensinya diantara 80%-90%. Hal itu terjadi karena realisasi pendapatannya lebih besar daripada realisasi belanja daerah. Tahun 2008 dan 2009 tergolong tidak efisien karena nilai rasionya sudah di atas 100%. Total belanjanya melebihi total pendapatan daerah. Pada tahun 2010 dan 2011 efisiensinya tergolong Kurang Efisien yaitu sebesar 98,49% dan 91,87%. Hal ini diakibatkan terjadinya selisih yang cukup besar antara pendapatan dengan belanja.

5. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal.

Hasil dari perhitungan Rasio Keserasian dapat dilihat pada tabel 15.

Dan tabel 16. di bawah ini :

Tabel 15. Penghitungan Rasio Keserasian DPPKAD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2007-2011 (Belanja Operasi)

Tahun Anggaran	Total Belanja (Rp)	Realisasi Belanja Operasi (Rp)	Rasio Belanja Operasi (%)
2007	568.072.452.180,00	425.300.060.386,00	74,87
2008	769.142.354.777,00	577.494.559.219,00	75,08
2009	804.635.000.321,00	733.757.544.269,00	91,19
2010	797.077.475.755,00	743.451.499.455,00	93,27
2011	925.821.578.064,00	818.040.451.153,00	88,36

Sumber Data : DPPKAD Kabupaten Blora (diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 15. di atas diketahui bahwa rata-rata Rasio Keserasian Belanja Operasi DPPKAD Kabupaten Blora 86,93%. Dimulai pada tahun 2007 di mana rasio nya sebesar 74,87% meningkat pada tahun 2008 menjadi 75,08%, dan mengalami peningkatan lagi menjadi 91,19% pada tahun 2008. Tahun 2010 juga mengalami peningkatan menjadi 93,27%, namun pada tahun 2011 terjadi penurunan yaitu menjadi 88,36%.

Tabel 16. Penghitungan Rasio Keserasian DPPKAD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2007-2011 (Belanja Modal)

Tahun Anggaran	Total Belanja (Rp)	Realisasi Belanja Modal (Rp)	Rasio Belanja Modal (%)
2007	568.072.452.180,00	112.130.944.050,00	19,74
2008	769.142.354.777,00	141.454.931.615,00	18,39
2009	804.635.000.321,00	69.902.568.615,00	8,69
2010	797.077.475.755,00	53.346.801.300,00	6,69
2011	925.821.578.064,00	105.829.479.211,00	11,43

Sumber Data : DPPKAD Kabupaten Blora (diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 16. di atas diketahui bahwa rata-rata Rasio Keserasian Belanja Modal DPPKAD Kabupaten Blora 13,16%. Dimulai pada tahun 2007 dimana rasio nya sebesar 19,74% mengalami penurunan pada tahun 2008 menjadi 18,39%, dan mengalami penurunan lagi menjadi 8,69% pada tahun 2008. Tahun 2010 juga mengalami penurunan menjadi 6,69%, namun pada tahun 2011 terjadi kenaikan menjadi 11,43%.

D. Pembahasan

1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Pada Tabel 11. menunjukan bahwa PAD Kabupaten Blora dari tahun 2007 sampai dengan 2011 mengalami penurunan dan kenaikan. Pada tahun 2007 PAD Kabupaten Blora sebesar Rp 41.620.458.144,00 atau sebesar 6,46% dari total pendapatan. Mengalami kenaikan pada tahun 2008 yaitu menjadi Rp 50.203.192.750,00 atau sebesar 7,05% dari total pendapatan. Pada tahun 2009 PAD Kabupaten Blora mengalami penurunan menjadi Rp

49.696.650.709,00 atau sebesar 6,88% dari total pendapatan. Pada tahun 2010 mengalami penurunan yaitu menjadi Rp 47.087.584.059,00 atau sebesar 5,82% dari total pendapatan. Kemudian pada tahun 2011 mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp 67.022.069.902,00 atau 6,65% dari total pendapatan.

Total pendapatan daerah Kabupaten Blora dari tahun 2007 sampai dengan 2011 selalu mengalami kenaikan. Berawal dari tahun 2007 total pendapatan daerah sebesar Rp 643.901.838.064,00. Mengalami kenaikan sebesar 10,53% atau menjadi Rp 711.701.566.955,00 pada tahun 2008. Pada tahun 2009 total pendapatan daerah sebesar Rp 722.238.085.646,00 naik 1,48% dari tahun sebelumnya, kemudian tahun berikutnya tahun 2010 naik sebesar 12,04 % atau menjadi Rp 809.229.173.421,00. Pada tahun 2011 juga mengalami kenaikan sebesar 24,54% atau menjadi Rp 1.007.776.182.838,00.

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 11. dapat dilihat bahwa Kinerja Keuangan DPPKAD Kabupaten Blora jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dikategorikan Sangat Kurang. Dimulai pada tahun 2007 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada DPPKAD Kabupaten Blora sebesar 6,46%, naik menjadi 7,05% pada tahun 2008. Tahun 2009 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada DPPKAD Kabupaten Blora sebesar 6,88%. Pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi 5,82%, namun terjadi kenaikan di tahun 2011 menjadi 6,65%. Meskipun mengalami kenaikan pada tahun terakhir namun seluruhnya dapat dikatakan kemampuan keuangan

DPPKAD Kabupaten Blora masih Sangat Kurang, karena masih berada dalam skala interval 00,00-10,00%.

Menurut uraian dan perhitungan pada tabel 11. dapat dilihat disimpulkan bahwa Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal selama lima tahun pada Pemerintah Kabupaten Blora masih Sangat Kurang karena masih berada dalam skala interval 0,00% - 10,00% dan ini berarti bahwa PAD memiliki kemampuan yang Sangat Kurang dalam membiayai pembangunan daerah. Hal ini terjadi karena PAD di Kabupaten Blora masih relatif kecil bila dibandingkan dengan total pendapatan daerah. Selain itu partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah masih sangat kurang sehingga menyebabkan PAD tidak memiliki andil besar dalam membiayai pembangunan daerah di Kabupaten Blora. Pemerintah Kabupaten Blora dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan masih sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi setempat. Untuk karena itu kedepannya Pemerintah Kabupaten Blora diharapkan untuk berupaya meningkatkan PAD nya dengan mengembangkan potensi-potensi yang sudah ada maupun menggali potensi-potensi yang baru.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni (2008) di Sragen dijelaskan bahwa Kinerja Keuangan Kabupaten Sragen tahun 2002-2006 jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal ini masih tergolong Sangat Kurang karena rata-rata rasionya sebesar 9,69%. Hal tersebut kurang lebih

hampir sama dengan apa yang terjadi di Kabupaten Blora dimana rata-rata kinerja keuangannya sebesar 6,57% dan tergolong Sangat Kurang meskipun hal tersebut tidak dapat dijadikan perbandingan karena perbedaan tahun penelitiannya. Menurut Sri Wahyuni permasalahan yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Sragen adalah ketidakmampuan pemerintah daerah yang bersangkutan untuk menggali potensi-potensi daerah yang ada guna meningkatkan PAD dan ketergantungan yang masih sangat besar terhadap bantuan ataupun pinjaman dari pemerintah pusat. Begitupun juga yang terjadi di Kabupaten Blora dimana peneliti menyimpulkan bahwa ketidakmampuan pemerintah daerah untuk menggali potensi-potensi yang ada menyebabkan kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Blora dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal masih tergolong sangat kurang.

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Pada Tabel 12. menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Blora dari tahun 2007 sampai dengan 2011 mengalami penurunan dan kenaikan. Pada tahun 2007 PAD Kabupaten Blora sebesar Rp 41.620.458.144,00 atau sebesar 6,46% dari total pendapatan. Mengalami kenaikan pada tahun 2008 yaitu menjadi Rp 50.203.192.750,00 atau sebesar 7,05% dari total pendapatan. Pada tahun 2009 PAD Kabupaten Blora mengalami penurunan menjadi Rp 49.696.650.709,00 atau sebesar 6,88% dari total pendapatan. Pada tahun 2010 mengalami penurunan yaitu menjadi Rp 47.087.584.059,00 atau sebesar 5,82%

dari total pendapatan. Kemudian pada tahun 2011 mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp 67.022.069.902,00 atau 6,65% dari total pendapatan.

Berdasarkan perhitungan pada tabel 12. menunjukkan bahwa pendapatan atau bantuan dari pihak ekstern dalam hal ini bantuan dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah pusat selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2007 sebesar Rp 592.594.398.466,00, kemudian pada tahun 2008 mengalami kenaikan 9,29% atau sebesar Rp 647.663.147.705,00. Pada tahun 2009 sebesar Rp 672.541.434.937,00 atau naik 3,84% dari tahun sebelumnya, kemudian mengalami peningkatan sebesar 10,58% atau menjadi Rp 743.695.142.362,00 pada tahun 2010. Pada tahun 2011 kembali mengalami kenaikan sebesar 22,65% atau menjadi Rp 912.112.701.186,00. Untuk peningkatan pendapatan dari pihak ekstern ini meningkat karena adanya peningkatan pada pos-pos dana perimbangan dari pemerintah pusat seperti : Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan DAK (Dana Alokasi Khusus) pada tahun 2008, 2009, 2010 dan 2011, disamping itu juga diturunkannya dana perimbangan dari provinsi pada tahun 2010 dan 2011.

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 12. kemampuan keuangan DPPKAD Kabupaten Blora tergolong masih sangat rendah dan pola hubungannya termasuk pola hubungan Instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Terjadi kenaikan maupun

penurunan dari tahun 2007 sampai tahun 2011. Berawal pada tahun 2007 Rasio Kemandirian sebesar 7,02%, kemudian naik menjadi 7,75% pada tahun 2008. Pada tahun 2009 Rasio Kemandirian sebesar 7,39% kemudian turun pada tahun 2010 sebesar 6,33%. Pada tahun 2011 terjadi kenaikan menjadi 7,35%. Jika dilihat dari tahun ke tahun pola kemandirian keuangannya masih tergolong pola hubungan Instruktif karena masih tergolong dalam interval 0% - 25% dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada pemerintah daerah itu sendiri.

Menurut uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah selama lima tahun pada Pemerintah Kabupaten Blora memiliki rata-rata kemandiriannya masih tergolong rendah dan dalam kategori kemampuan keuangan kurang dengan pola hubungan Instruktif yaitu peranan pemerintah pusat masih sangat dominan dibandingkan pemerintah daerah, ini dapat dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih tergolong dalam interval 0% - 25%. Rasio Kemandirian yang masih rendah mengakibatkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Blora dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah masih sangat tergantung bantuan dari pemerintah pusat.

Jadi Kemandirian Keuangan DPPKAD Kabupaten Blora secara keseluruhan dapat dikatakan sangat rendah sekali, hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern masih

sangat tinggi. Daerah belum mampu mengoptimalkan PAD untuk membiayai pembangunan daerahnya. Kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pembayaran pajak dan retribusi juga salah satu hal yang menyebabkan PAD yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten Blora sedikit dan belum bisa dapat diandalkan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Selain itu, juga dikarenakan adanya perbedaan besarnya pinjaman serta bantuan dari pusat dan total pendapatan pada masing-masing daerah dan realisasi belanja pada masing-masing daerah. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Sri Widada (2012) Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Klaten pada tahun 2006-2010 jika dilihat dari Rasio Kemandirian tergolong rendah sekali atau Instrukturif. Rata-rata rasionya sebesar 4,95%. Hal tersebut juga terjadi di Kabupaten Blora pada penelitian ini dimana rata-rata rasionya sebesar 7,17% dan Kinerja Keuangannya tergolong Instrukturif. Menurut Sri Widada penyebab terjadinya kinerja keuangan yang rendah sekali tersebut hamper sama apa yang dijelaskan pada penelitian ini dimana kedua daerah ini masih mengandalkan bantuan dari pemerintah baik pusat maupun provinsi dan belum mampu untuk mengolah potensi yang

mereka miliki sendiri guna menaikkan PAD.

3. Rasio Efektivitas PAD

Berdasarkan perhitungan pada tabel 13. menunjukkan bahwa anggaran PAD Kabupaten Blora selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007 PAD dianggarkan sebesar Rp 30.732.453.000,00 atau 5,03% dari total anggaran pendapatan. Pada tahun 2008 anggaran PAD dinaikan menjadi Rp 45.377.729.000,00 atau 6,44% dari total anggaran pendapatan. Pada tahun 2009 PAD dianggarkan sebesar Rp 50.000.000.000,00 atau 7% dari total anggaran pendapatan. Kemudian pada tahun 2010 anggaran PAD dinaikan menjadi Rp 56.500.000.000,00 atau 6,91% dari total anggaran pendapatan. Pada tahun 2011 anggaran PAD kembali naik menjadi Rp 58.400.000.000,00 atau 5,91% dari total anggaran pendapatan.

Realisasi PAD Kabupaten Blora dari tahun 2007 sampai dengan 2011 mengalami penurunan dan kenaikan. Pada tahun 2007 PAD Kabupaten Blora sebesar Rp 41.620.458.144,00 atau sebesar 6,46% dari total pendapatan. Mengalami kenaikan pada tahun 2008 yaitu menjadi Rp 50.203.192.750,00 atau sebesar 7,05% dari total pendapatan. Pada tahun 2009 PAD Kabupaten Blora mengalami penurunan menjadi Rp 49.696.650.709,00 atau sebesar 6,88% dari total pendapatan. Pada tahun 2010 mengalami penurunan yaitu menjadi Rp 47.087.584.059,00 atau sebesar 5,82% dari total pendapatan. Kemudian pada tahun 2011 mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp

67.022.069.902,00 atau 6,65% dari total pendapatan.

Berdasarkan perhitungan pada tabel 13. dapat diketahui bahwa Efektivitas PAD Keuangan DPPKAD Kabupaten Blora pada tahun 2007 sebesar 135,43%, tahun 2008 sebesar 110,63%, tahun 2009 sebesar 99,39%, tahun 2010 sebesar 83,34%, dan tahun 2011 sebesar 114,76. Efektivitas kinerja keuangan Kabupaten Blora untuk tahun 2009 dan 2010 berjalan Tidak Efektif karena efektivitasnya masih dibawah 100% . Untuk tahun 2007, 2008, dan 2011 sudah Efektif karena nilai yang diperoleh sudah lebih dari 100%.

Menurut uraian dan hasil perhitungan pada tabel 13. Efektivitas Kinerja Keuangan Kabupaten Blora sudah Efektif karena rata-rata efektivitasnya di atas 100% yaitu 108,71%. Hal ini disebabkan karena penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah melebihi dari yang dianggarkan sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Blora juga dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan.

Namun untuk tetap mempertahankan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus terus mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan PAD. Pemerintah Daerah harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya, dan hal ini memerlukan kreatifitas dari aparat pelaksanaan keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama

pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Fitriyah Agustin (2007) yang melakukan penelitian di Kabupaten Blitar dijelaskan bahwa kinerja keuangan Blitar jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD sudah Efektif. Begitupun juga dalam penelitian ini dimana kinerja keuangan Kabupaten Blora sudah efektif. Kedua daerah ini dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan.

4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Berdasarkan perhitungan pada tabel 14. diketahui realisasi total belanja daerah Kabupaten Blora dari tahun 2007 sampai dengan 2011 rata-rata mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2010 dimana terjadi penurunan belanja daerah. Pada tahun 2007 belanja daerah Kabupaten Blora sebesar Rp 568.072.452.180,00, naik menjadi Rp 769.142.354.777,00 pada tahun 2008. Kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2009 menjadi Rp 804.635.000.321,00. Dan pada tahun 2010 terjadi penurunan belanja daerah menjadi Rp 797.077.475.755,00, naik kembali pada tahun 2011 menjadi Rp 925.821.578.064,00.

Total pendapatan daerah Kabupaten Blora dari tahun 2007 sampai dengan 2011 selalu mengalami kenaikan. Berawal dari tahun 2007 total pendapatan daerah sebesar Rp 643.901.838.064,00. Mengalami kenaikan

sebesar 10,53% atau menjadi Rp 711.701.566.955,00 pada tahun 2008. Pada tahun 2009 total pendapatan daerah sebesar Rp 722.238.085.646,00 naik 1,48% dari tahun sebelumnya, kemudian tahun berikutnya tahun 2010 naik sebesar 12,04 % atau menjadi Rp 809.229.173.421,00. Pada tahun 2011 juga mengalami kenaikan sebesar 24,54% atau menjadi Rp 1.007.776.182.838,00.

Berdasarkan perhitungan pada tabel 14. juga diketahui bahwa rata-rata Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Blora tahun 2007 sampai dengan 2011 sebesar 99,61% atau dapat dikatakan Kurang Efisien. Pada tahun 2007 rasio efisiensinya sebesar 88,22%, kemudian tahun 2008 menjadi 108,07%, tahun 2009 sebesar 111,41%, tahun 2010 sebesar 98,49%, dan tahun 2011 sebesar 91,87%.

Rata-rata Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Blora yang tergolong masih Kurang Efisien karena rata-rata rasionya 99,61% diakibatkan karena total belanja daerahnya masih lebih besar daripada pendapatan daerahnya terutama pada tahun 2008 dan 2009. Meskipun pada tahun 2008 dan 2009 tersebut Pemerintah Kabupaten Blora sudah dapat menekan belanjanya daripada yang dianggarkan sebelumnya namun jumlah pendapatan yang diperolehnya masih sedikit jumlahnya bila dibandingkan dengan belanja daerahnya. Sehingga dapat dikatakan kinerja Pemerintah Kabupaten Blora dalam hal ini masih buruk karena belum dapat menekan jumlah belanja daerahnya. Untuk kedepannya diharapkan Pemerintah Kabupaten Blora dapat

meminimalisir jumlah belanjanya dengan disesuaikan pendapatannya. Sehingga kedepannya dapat terjadi peningkatan efisiensi belanja daerah.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Andi Melisa Anastasia. B (2012) di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan Kinerja keuangannya jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah sudah Efisien karena rata-ratanya sebesar 87,34%. Menurut peneliti hal tersebut terjadi karena Pemerintah Kabupaten Bulukumba sudah berhasil menerapkan efisiensi anggarannya. Hal ini berbeda dengan apa yang terjadi dalam penelitian ini dimana efisiensi keuangan Pemerintah Kabupaten Blora Tidak Efisien.

5. Rasio Keserasian

Berdasarkan perhitungan pada tabel 15. dan 16. dapat diketahui bahwa realisasi total belanja daerah Kabupaten Blora dari tahun 2007 sampai dengan 2011 rata-rata mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2010 dimana terjadi penurunan belanja daerah. Pada tahun 2007 belanja daerah Kabupaten Blora sebesar Rp 568.072.452.180,00, naik menjadi Rp 769.142.354.777,00 pada tahun 2008. Kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2009 menjadi Rp 804.635.000.321,00. Dan pada tahun 2010 terjadi penurunan belanja daerah menjadi Rp 797.077.475.755,00, naik kembali pada tahun 2011 menjadi Rp 925.821.578.064,00.

Total Realisasi Belanja Operasi daerah yang terdiri atas : Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah,

Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Vertikal Dalam Negeri selalu terjadi peningkatan dari tahun 2007 sampai tahun 2011. Masing-masing sebesar : Rp 425.300.060.386,00; Rp 577.494.559.219,00; Rp 733.757.544.269,00; Rp 743.451.499.455,00; dan Rp 818.040.451.153,00. Sedangkan Total Realisasi Belanja Modal yang terdiri atas : Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset tetap lainnya, dan Belanja Aset Lainnya mengalami kenaikan dan penurunan. Penurunan terjadi pada tahun 2009 dan 2010 sedangkan tahun-tahun lainnya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Dari tabel 15. dan 16. itu juga dapat dilihat bahwa Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal yang belum stabil dari tahun ke tahun. Dimulai pada tahun 2007 Rasio Belanja Operasinya sebesar 74,87% mengalami kenaikan pada tahun 2008 menjadi 75,08%, kemudian naik lagi pada tahun 2009 menjadi 91,19%, dan pada tahun 2010 naik menjadi 93,27%. Baru pada tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 88,36%, sehingga rata-rata rasionya sebesar 84,55%. Sedangkan pada Rasio Belanja Modal pada tahun 2007 sebesar 19,74% turun menjadi 18,39% pada tahun 2008. Pada tahun 2009 mengalami penurunan kembali menjadi 8,69%, dan turun lagi pada tahun 2010 menjadi 6,69%. Pada tahun 2011 terjadi kenaikan kembali menjadi 11,43% sehingga rata-rata rasionya sebesar 12,99%.

Menurut uraian dan perhitungan di atas bahwa sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif kecil. Ini dapat dibuktikan dari rata-rata rasio belanja operasi yang masih besar dibandingkan dengan rata-rata rasio belanja modal. Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi terutama dikarenakan besarnya dinas-dinas otonomi dan belanja pegawai untuk gaji PNS. Dengan ini dapat menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Blora yang lebih condong pada pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas Pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan belum ada patokan yang pasti untuk belanja modal, sehingga Pemerintah Daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja operasi yang mengakibatkan belanja modal untuk Pemerintah Kabupaten Blora kecil atau belum terpenuhi. Untuk itu kedepannya Pemerintah Kabupaten Blora diharapkan lebih memperhatikan pelayanan kepada masyarakat yang nantinya dapat dinikmati langsung oleh publik. Karena pada dasarnya dana pada anggaran daerah adalah dana publik sehingga dana tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni (2008) dijelaskan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sragen jika dilihat dari Rasio Keserasian masih kurang stabil Karena selalu terjadi kenaikan maupun penurunan di tiap-tiap periode. Hal tersebut hamper sama apa yang terjadi

pada penelitian ini dimana Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora jika dilihat dari Rasio Keserasian masih tidak stabil.

E. Jawaban Pertanyaan Penelitian

1. Kinerja Keuangan DPPKAD Kabupaten Blora jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dikategorikan Sangat Kurang. Dimulai pada tahun 2007 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada DPPKAD Kabupaten Blora sebesar 6,46%, naik menjadi 7,05% pada tahun 2008. Tahun 2009 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada DPPKAD Kabupaten Blora sebesar 6,88%. Pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi 5,82%, namun terjadi kenaikan di tahun 2011 menjadi 6,65%. Meskipun mengalami kenaikan pada tahun terakhir namun seluruhnya dapat dikatakan kemampuan keuangan DPPKAD Kabupaten Blora masih sangat kurang, karena masih berada dalam skala interval 00,00-10,00%.
2. Kinerja Keuangan DPPKAD Kabupaten Blora jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tergolong masih sangat rendah dan pola hubungannya termasuk pola hubungan Instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Terjadi kenaikan maupun penurunan dari tahun 2007 sampai tahun 2011. Berawal pada tahun 2007 Rasio Kemandirian sebesar 7,02%, kemudian naik menjadi 7,75% pada tahun 2008. Pada tahun 2009 Rasio Kemandirian sebesar 7,39% kemudian turun

pada tahun 2010 sebesar 6,33%. Pada tahun 2011 terjadi kenaikan menjadi 7,35%. Jika dilihat dari tahun ke tahun pola kemandirian keuangannya masih tergolong pola hubungan Instrukturif karena masih tergolong dalam interval 0% - 25% dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada pemerintah daerah itu sendiri.

3. Kinerja Keuangan DPPKAD Kabupaten Blora jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD dapat diketahui bahwa efektivitas keuangan DPPKAD Kabupaten Blora pada tahun tahun 2007 sebesar 135,43%, tahun 2008 sebesar 110,63%, tahun 2009 sebesar 99,39%, tahun 2010 sebesar 83,34%, dan tahun 2011 sebesar 114,76. Efektivitas kinerja keuangan Kabupaten Blora untuk tahun 2009 dan 2010 berjalan Tidak Efektif karena efektivitasnya masih dibawah 100% . Untuk tahun 2007, 2008, dan 2011 sudah Efektif karena nilai yang diperoleh sudah lebih dari 100%.
4. Kinerja Keuangan DPPKAD Kabupaten Blora jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah diketahui bahwa rata-rata efisiensi keuangan daerah Kabupaten Blora tahun 2007 sampai dengan 2011 sebesar 99,61% atau dapat dikatakan Kurang Efisien. Pada tahun 2007 rasio efisiensinya sebesar 88,22%, kemudian tahun 2008 menjadi 108,07%, tahun 2009 sebesar 111,41%, tahun 2010 sebesar 98,49%, dan tahun 2011 sebesar 91,87%.
5. Kinerja Keuangan DPPKAD Kabupaten Blora jika dilihat dari Rasio Keserasian adalah belum stabil dari tahun ketahun. Dimulai pada tahun 2007

Rasio Belanja Operasinya sebesar 74,87% mengalami kenaikan pada tahun 2008 menjadi 75,08%, kemudian naik lagi pada tahun 2009 menjadi 91,19%, dan pada tahun 2010 naik menjadi 93,27%. Baru pada tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 88,36%, sehingga rata-rata rasionya sebesar 84,55%. Sedangkan pada Rasio Belanja Modal pada tahun 2007 sebesar 19,74% turun menjadi 18,39% pada tahun 2008. Pada tahun 2009 mengalami penurunan kembali menjadi 8,69%, dan turun lagi pada tahun 2010 menjadi 6,69%. Sedangkan pada tahun 2011 terjadi kenaikan kembali menjadi 11,43% sehingga rata-rata rasionya sebesar 12,99%.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kinerja Keuangan DPPKAD Kabupaten Blora jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dikategorikan Sangat Kurang, karena masih berada dalam skala interval 00,00%-10,00%. Berturut-turut dari tahun 2007 sampai dengan 2011 rasionya masing-masing sebesar: 6,46%; 7,05%; 6,88%; 5,82%; dan 6,65%.
2. Kinerja Keuangan DPPKAD Kabupaten Blora jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tergolong masih sangat rendah dan pola hubungannya termasuk pola hubungan Instruktif, karena masih tergolong dalam interval 0%-25%. Berturut-turut dari tahun 2007 sampai dengan 2011 rasionya masing-masing sebesar: 7,02%; 7,75%; 7,39%; 6,33%; dan 7,35%.
3. Kinerja Keuangan DPPKAD Kabupaten Blora jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD diketahui bahwa efektivitas keuangan DPPKAD Kabupaten Blora tahun 2009 dan 2010 berjalan Tidak Efektif karena efektivitasnya masih di bawah 100% yaitu sebesar 99,39% dan 83,34%. Tahun 2007, 2008, dan 2011 sudah Efektif karena nilai yang diperoleh sudah lebih dari 100% yaitu sebesar 135,43%; 110,63%; dan 114,76%.

4. Kinerja Keuangan DPPKAD Kabupaten Blora jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah diketahui bahwa rata-rata efisiensi keuangan daerah Kabupaten Blora tahun 2007 sampai dengan 2011 sebesar 99,61% atau dapat dikatakan Kurang Efisien. Berturut-turut dari tahun 2007 sampai dengan 2011 rasionya masing-masing sebesar: 88,22%; 108,07%; 111,41%; 98,49%; dan 91,87%.
5. Kinerja Keuangan DPPKAD Kabupaten Blora jika dilihat dari Rasio Keserasian adalah belum stabil dari tahun ketahun. Pengeluaran belanja operasi lebih besar dari belanja modal. Besarnya belanja operasi berada pada kisaran 74,87%-93,27%, rata-rata sebesar 84,55%, hal ini disebabkan oleh besarnya belanja pegawai karena penambahan jumlah pegawai negeri sipil dan dinas-dinas terbaru. Untuk belanja modal berada pada kisaran 6,69%-19,74%, rata-rata sebesar 12,99% sehingga dapat dikatakan Pemerintah Kabupaten Blora masih kurang memperhatikan pembangunan daerah.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan PAD. Peningkatan PAD bisa dilakukan Pemerintah Daerah dengan cara melaksanakan secara optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk

mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam pemungutan PAD oleh aparat daerah. Selain itu Pemerintah Daerah harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya, dan hal ini memerlukan kreativitas dari aparat pelaksanaan keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial. Selain itu Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengurangi ketergantungannya terhadap bantuan dari pemerintah pusat.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sama diharapkan untuk lebih mendalam mengenai kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah dengan menggunakan lebih banyak rasio lagi sehingga hasil penelitiannya bisa lebih andal dan akurat daripada penelitian oleh penulis ini. Selain itu juga penelitian ini hanya dilakukan pada salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Tengah yaitu Kabupaten Blora. Diharapkan penelitian selanjutnya melakukan penelitian di lingkup yang lebih luas dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Abdul Halim. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi Ketiga*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Anita Wulandari. (2001). “Kemampuan Keuangan Daerah di Kota Jambi Dalam Melaksanakan Otonomi Daerah.” *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Kemampuan Keuangan Daerah* (Vol. 5, No. 2). November.
- Aries Djaenuri. (2012). *Hubungan Keuangan Pusat Daerah*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Efferin, Sujoko Stevanus Hadi Darmadji, Yuliawati Tan. (2008). *Metode Penelitian Akuntansi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Fitriyah Agustin. (2007). “Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar)”. *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang.
- Hendro Sumarjo. (2010). “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.” *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Ibnu Syamsi. (1986). *Pokok-Pokok Kebijaksanaan, Perencanaan, Pemrograman, Dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional Dan Regional*. Jakarta: CV Rajawali.
- Jonathan Sarwono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Dua*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mardiasmo. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mirna Sesotyaningsih. (2012). “Pengaruh Leverage, Ukuran Legislatif, Intergovernmentak, Revenue, dan Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.” *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang*.

Mohammad Mahsun. (2009). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta :
BPFE.

Nurhidayat. (2005). *Otonomi Daerah Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, UU RI No. 32 Tahun 2004 & UU RI No. 33 Tahun 2004*. Bandung :
Nuansa Aulia.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 tahun 2001 pasal 1 ayat (1) tentang Retribusi Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Suparmoko. (1987). *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta :
BPFE.

Sri Wahyuni. (2008). “Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sragen Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah.” *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta*.

Sri Widada. (2012). “Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten.” *Skripsi Fakultas Ekononmi Universitas Negeri Yogyakarta*.

<http://www.blorakab.go.id/>.

<http://www.djpk.depkeu.go.id/>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH (DPPKAD)**
Jl. Pemuda No. 16A Telp./ Fax.(0296) 531202
Blora – 58215

Blora, 10 Januari 2013

K e p a d a Y t h. ;

Nomor : 449 / 35
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Survey

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta
di

YOGYAKARTA

Memperhatikan surat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta tanggal 14 Desember 2012 nomor : 2525/UN34.18/PL/2012 perihal tersebut pada pokok surat diberitahukan dengan hormat bahwa pada prinsipnya kami dapat memberikan ijin survey kepada :

Nama : Hony Adhiantoko
NIM : 09412144001
Jurusan/Prodi : Pendidikan Akuntansi/Akuntansi
Judul : Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2009 -2011)

Demikian ijin survey ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

An. KEPALA DINAS PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BLORA

Sekretaris

SAHIB, S. Sos

Pembina

NIP. 196107061981031002

Tembusan :

1. Kasubbag Pendidikan UNY di Yogyakarta ;
2. Mahasiswa yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH (D P P K A D)
 Jl. Pemuda No. 16 A Telp. 531202 Blora

SURAT KETERANGAN

Nomor : 071 / 102 / 2013

Dengan ini kami Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

N a m a : HONY ADHIANTOKO.

N I M : 094 121 44 001

Tempat / Tanggal lahir : Blora, 23 Juni 1991

Alamat Rumah : Jl. Gatot Subroto 203 Blora

Alamat Kampus : Universitas Negeri Yogyakarta.

Telah melaksanakan research / survey di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Blora mulai tanggal 7 Januari 2013 sampai dengan 19 Pebruari 2013, dalam rangka penyusunan penelitian berjudul : Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (Studi kasus pada DPPKAD Kabupaten Blora tahun 2009 – 2011)

Demikian surat keterangan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Blora

Pada Tanggal : 26 Pebruari 2013.

An. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan
 Keuangan dan Aset Daerah Kab. Blora
 Sekretaris,


SABID, S.Sos.
 Pembina
 NIP. 19610816 198711 1 003

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 4 TAHUN 2008

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2007 DAN 2006

NO URUT	URAIAN	ANGGARAN 2007	REALISASI 2007	(%)	REALISASI 2006
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.840.353.000	6.372.372.461	109,11	5.614.396.558
4	Pendapatan Retribusi Daerah	17.084.600.000	18.777.571.873	109,91	15.310.306.354
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg dipisahkan	125.000.000	1.315.791.765	1.052,63	107.074.805
6	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	7.682.500.000	15.154.722.045	197,26	15.458.749.054
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	30.732.453.000	41.620.458.144	135,43	36.490.526.771
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	60.170.307.000	72.001.086.736	119,66	54.821.420.902
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		9.437.277.837		3.444.970.128
13	Dana Alokasi Umum	447.775.000.000	447.775.000.000	100,00	410.074.000.000
14	Dana Alokasi Khusus	43.376.000.000	43.376.000.000	100,00	11.840.000.000
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)	551.321.307.000	572.589.364.573	103,86	480.180.391.030
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
18	Dana Otonomi Khusus		-	-	-
19	Dana Penyesuaian		-	-	-
20	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 + 19)				
22	TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	19.491.495.000	20.005.033.893	102,63	19.042.656.755
24	Pendapatan Bagi Hasil lainnya				2.256.036.000
25	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi (23+24)	19.491.495.000	20.005.033.893	102,63	21.298.692.755
26	Total Pendapatan Transfer (7 + 20 + 25)	570.812.802.000	592.594.398.466	103,82	501.479.083.785
28	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
29	Pendapatan Hibah		1.255.000		-
30	Pendapatan Dana Darurat				-
31	Pendapatan Lainnya	9.603.712.000	9.685.726.454	100,85	1.500.000.000
32	Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah (29 s/d 31)	9.603.712.000	9.686.981.454	100,85	1.500.000.000
33	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)	611.148.967.000	643.901.838.064	105,36	539.469.610.556
34	BELANJA				
35	BELANJA OPERASI				
37	Belanja Pegawai	365.019.613.000	337.521.481.450	92,47	254.931.202.190
38	Belanja Barang	81.855.179.000	64.655.711.857	78,99	80.537.072.177
39	Bunga	120.000.000	73.625.089	61,35	-
40	Subsidi				-
41	Hibah				-
42	Bantuan Sosial	24.431.000.000	23.049.241.990	94,34	6.758.972.750
43	Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 42)	471.425.792.000	425.300.060.386	90,22	342.227.247.117
45	BELANJA MODAL				
46	Belanja Tanah	1.468.700.000	1.050.000.000	71,49	1.504.213.150
47	Belanja Peralatan dan Mesin	21.464.425.000	16.749.291.813	78,03	11.897.198.374
48	Belanja Gedung dan Bangunan	51.300.235.000	44.397.818.287	86,55	16.058.990.563
49	Belanja Jalan, Irigasi dan Jembatan	56.615.410.000	49.204.681.540	86,91	27.772.566.029
50	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.035.578.000	729.152.400	70,41	938.387.500
51	Belanja Aset Lainnya				-
52	Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51)	131.884.348.000	112.130.944.050	85,02	58.171.355.616
54	BELANJA TIDAK TERDUGA				
55	Belanja Tidak Terduga	2.225.413.000	256.978.668	11,55	537.600.000
56	Jumlah Belanja Tak Terduga (55)	2.225.413.000	256.978.668	11,55	537.600.000
57	JUMLAH BELANJA (43+52+56)	605.536.553.000	537.687.983.104	88,80	400.936.202.733
59	TRANSFER				
60	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA				
61	Bagi Hasil Pajak				
62	Bagi Hasil Retribusi				
63	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	31.546.226.000	30.384.469.076	96,32	47.287.760.717
64	Jumlah Transfer/Bagi Hasil Kedesa (61 s/d 63)	31.546.226.000	30.384.469.076	96,32	47.287.760.717
65	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (57 + 64)	637.081.779.000	568.072.452.180	89,17	448.223.963.450
66	Surplus/Defisit (33- 65)	(25.932.812.000)	75.829.385.884	(292,41)	91.245.647.106

NO URUT	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
76	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank				
77	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank				
78	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi				
79	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya				
80	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara				
81	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah				
82	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya				
83	Penerimaan Kembali Pinjaman Lainnya		2.350.594.000,00	(2.350.594.000,00)	-
84	Jumlah Penerimaan (71 s/d 83)	143.334.787.000,00	221.691.090.905,00	(78.356.303.905,00)	154,87
85					
86	PENGELUARAN DAERAH				
87	Pembentukan Dana Cadangan				
88	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	3.718.000.000,00	2.528.000.000,00	1.190.000.000,00	67,99
89	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat				
90	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah				
91	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	70.700.000,00	70.657.958,00	#2.042,00	99,94
92	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank				
93	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi				
94	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	53.745.000,00	53.745.000,00		100,00
95	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara				
96	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah				
97	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya				
98	Pemberian Pinjaman Lainnya				
99	Jumlah Pengeluaran (87 s/d 98)	3.842.445.000,00	2.652.402.958,00	1.190.042.042,00	69,03
100	PEMBIAYAAN NETO	139.492.342.000,00	219.038.687.947,00	(79.546.345.947,00)	157,03
101					
102	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (66+100)	2.476.518.000,00	161.597.900.125,00	(159.121.382.125,00)	6.525,21

BUPATI BLORA

ttt

YUDHI SANCOYO

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2008

NUMER 2 TAHUN 2009

NO URUT	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	6.000.000.000,00	7.008.511.926,00	(1.008.511.926,00)	116,81
4	Pendapatan Retribusi Daerah	17.870.686.000,00	21.593.456.666,00	(3.722.770.666,00)	121,17
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg dipisahkan	1.356.226.000,00	1.929.149.497,00	(572.923.497,00)	142,24
6	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	20.200.317.000,00	19.672.074.661,00	528.242.339,00	87,38
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	45.377.229.000,00	50.203.192.750,00	(4.825.963.750,00)	110,84
8					
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	81.030.326.000,00	69.733.590.581,00	11.296.735.419,00	86,06
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	10.948.716.825,00	(10.948.716.825,00)	-
13	Dana Alokasi Umum	478.260.120.000,00	478.260.120.000,00	-	100,00
14	Dana Alokasi Khusus	58.314.000.000,00	56.700.000.000,00	1.614.000.000,00	87,23
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)	617.604.446.000,00	615.642.427.406,00	1.962.018.594,00	99,66
16					
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
18	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
19	Dana Penyesuaian	7.924.314.000,00	7.924.316.400,00	(2.400,00)	100,00
20	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 + 19)	7.924.314.000,00	7.924.316.400,00	(2.400,00)	100,00
21					
22	TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	21.517.630.000,00	24.096.403.899,00	(2.578.773.899,00)	111,96
24	Pendapatan Bagi Hasil lainnya	-	-	-	-
25	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi (23+24)	21.517.630.000,00	24.096.403.899,00	(2.578.773.899,00)	111,96
26	Total Pendapatan Transfer (7 + 20 + 25)	647.046.390.000,00	647.663.147.705,00	(616.757.705,00)	100,10
27					
28	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
29	Pendapatan Hibah	-	3.000.000.000,00	(3.000.000.000,00)	-
30	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-
31	Pendapatan Lainnya	12.338.901.000,00	10.835.226.500,00	1.503.674.500,00	87,81
32	Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah (29 s/d 31)	12.338.901.000,00	13.835.226.500,00	(1.496.325.500,00)	112,13
33	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)	704.762.520.000,00	711.701.566.955,00	(6.939.046.955,00)	100,98
34					
35	BELANJA				
36	BELANJA OPERASI				
37	Belanja Pegawai	450.046.556.700,00	423.140.432.044,00	26.906.124.656,00	94,02
38	Belanja Barang	147.787.562.350,00	127.773.994.306,00	20.013.568.044,00	86,46
39	Bunga	120.000.000,00	69.400.017,00	50.599.983,00	57,83
40	Subsidi	-	-	-	-
41	Hibah	5.642.402.000,00	3.947.500.000,00	1.694.902.000,00	69,96
42	Bantuan Sosial	24.861.304.000,00	27.563.232.852,00	(2.298.071.148,00)	90,76
43	Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 42)	628.457.825.050,00	577.494.559.219,00	60.963.265.831,00	91,89
44					
45	BELANJA MODAL				
46	Belanja Tanah	1.684.493.000,00	101.449.400,00	1.583.043.600,00	6,02
47	Belanja Peralatan dan Mesin	28.784.253.600,00	25.087.306.105,00	3.696.947.495,00	87,16
48	Belanja Gedung dan Bangunan	81.093.347.850,00	72.093.201.941,00	9.000.145.909,00	88,90
49	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	45.672.893.000,00	42.905.846.294,00	2.767.046.706,00	93,94
50	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.268.031.500,00	1.267.127.875,00	903.625,00	99,83
51	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-
52	Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51)	158.803.018.950,00	141.454.931.615,00	17.048.087.335,00	89,24
53					
54	BELANJA TIDAK TERDUGA				
55	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	25.500.000,00	1.974.500.000,00	1,28
56	Jumlah Belanja Tak Terduga (55)	2.000.000.000,00	25.500.000,00	1.974.500.000,00	1,28
57	JUMLAH BELANJA (43+52+56)	788.960.844.000,00	718.974.990.834,00	69.985.853.166,00	91,13
58					
59	TRANSFER				
60	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA				
61	Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
62	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-
63	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	52.817.500.000,00	50.167.363.943,00	2.650.136.057,00	94,98
64	Jumlah Transfer/Bagi Hasil Kedesa (61 s/d 63)	52.817.500.000,00	50.167.363.943,00	2.650.136.057,00	94,98
65	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (57 + 64)	841.778.344.000,00	769.142.354.777,00	72.635.989.223,00	91,37
66	Surplus/Defisit (33-65)	(137.015.824.000,00)	(57.440.787.822,00)	(79.575.036.178,00)	41,92
67					
68	PEMBIAYAAN				
69					
70	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
71	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	142.624.695.000,00	219.340.496.905,00	(76.715.801.905,00)	153,76
72	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
73	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yg dipisahkan	710.092.000,00	-	710.092.000,00	-
74	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-	-	-
75	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-

67					
68	PEMBIAYAAN				
69					
70	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
71	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran				
72	Pencairan Dana Cadangan	3/ 267 496 000	142 624 695.484	382,71	53.043.559.717
73	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan				
74	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat				
75	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya				
76	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank				
77	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank				
78	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi				
79	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya				
80	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara				
81	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah				
82	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya				
83	Penerimaan Kembali Pinjaman Lainnya				
84	Jumlah Penerimaan (71 s/d 83)	699.092.000	1.239.473.495	177,30	
85		37.966.588.000	143.864.168.979	378,92	53.043.559.717
86	PENGELUARAN DAERAH				
87	Pembentukan Dana Cadangan				
88	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah				
89	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	1 602 000.000	215.000.000	13,42	1.489.753.286
90	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah				
91	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank				
92	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	70 658 000	70.657.958	100,00	174.758.053
93	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi				
94	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya				
95	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara				
96	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah				
97	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya				
98	Pemberian Pinjaman Lainnya				
99	Jumlah Pengeluaran (87 s/d 98)	53 000 000	53.000.000	100,00	
100	PEMBIAYAAN NETO	1.725.658.000	338.657.958	19,62	1.664.511.339
101		36 240 930 000	143 525 511 021	396,03	51 379 048 378
102	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (86+100)	10.308.118.000	219.354.896.905	103,62	142.624.695.484

BUPATI BLORA

Ttd.

YUDHI SANCOYO



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2009 dan 2008

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
3	Pendapatan Pajak Daerah	6.595.900.000,00	8.116.956.841,00	123,06
4	Pendapatan Retribusi Daerah	23.364.861.000,00	23.542.075.234,00	100,76
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.174.000.000,00	2.291.248.882,00	105,39
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	17.865.239.000,00	15.746.369.752,00	88,14
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	50.000.000.000,00	49.696.650.709,00	99,39
8	PENDAPATAN TRANSFER			
9	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan			
10	Dana Bagi Hasil Pajak	69.345.646.000,00	72.047.434.510,00	103,90
11	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	19.855.604.000,00	10.217.531.374,00	51,46
12	Dana Alokasi Umum	487.316.394.000,00	487.316.394.000,00	100,00
13	Dana Alokasi khusus	52.242.000.000,00	52.242.000.000,00	100,00
	Jumlah pendapatan Transfer Dana Perimbangan (10 s/d 13)	628.759.044.000,00	621.823.359.884,00	98,90
14	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya			
15	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00
16	Dana Penyesuaian	0,00	14.375.625.000,00	0,00
17	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (15 s/d 16)	0,00	14.375.625.000,00	0,00
18	Transfer Pemerintah Provinsi			
19	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	24.576.842.000,00	26.698.250.053,00	108,63
20	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	9.744.200.000,00	9.644.200.000,00	98,97
21	Jumlah Pendapatan Transfer Provinsi (19 s/d 20)	34.321.042.000,00	36.342.450.053,00	105,89
22	Total Pendapatan Transfer (13+17+21)	663.080.086.000,00	672.541.434.937,00	101,43
23	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH			
24	Pendapatan Hibah	900.000.000,00	0,00	0,00
25	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
26	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00
27	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah (24 s/d 26)	900.000.000,00	0,00	0,00
28	Jumlah Pendapatan (7+22+27)	713.980.086.000,00	722.238.085.646,00	101,16

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
1	2	3	4	5
29	BELANJA			
30	BELANJA OPERASI			
31	Belanja Pegawai	486.906.285.400,00	462.694.455.358,00	95,03
32	Belanja Barang	127.659.578.400,00	109.621.645.734,00	85,87
33	Belanja Bunga	120.000.000,00	61.045.040,00	50,87
34	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
35	Belanja Hibah	61.479.900.000,00	60.728.677.050,00	98,78
36	Belanja Bantuan Sosial	40.739.584.000,00	32.161.965.587,00	78,95
37	Belanja Bantuan Keuangan	73.525.800.000,00	68.489.755.500,00	93,15
38	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Vertikal Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00
39	Jumlah Belanja Operasi (31 s/d 38)	790.431.147.800,00	733.757.544.269,00	92,83
40	BELANJA MODAL			
41	Belanja Tanah	1.902.597.000,00	70.240.000,00	3,69
42	Belanja Peralatan dan Mesin	22.713.939.500,00	20.122.106.400,00	88,59
43	Belanja Gedung dan Bangunan	20.997.650.000,00	14.592.073.840,00	69,49
44	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	34.551.856.700,00	33.634.010.975,00	97,34
45	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.602.970.000,00	1.484.137.400,00	92,59
46	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
47	Jumlah Belanja Modal (41 s/d 46)	81.769.013.200,00	69.902.568.615,00	85,49
48	BELANJA TIDAK TERDUGA			
49	Belanja Tidak Terduga	1.250.000.000,00	974.887.437,00	77,99
50	Jumlah Belanja Tidak Terduga (49)	1.250.000.000,00	974.887.437,00	77,99
51	Jumlah Belanja (39+47+50)	873.450.161.000,00	804.635.000.321,00	92,12
52	TRANSFER			
53	TRANSFER BAGI HASIL KE DESA			
54	Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00
55	Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00	0,00
56	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00
57	Jumlah Transfer Bagi Hasil ke Desa (54 s/d 56)	0,00	0,00	0,00
58	Jumlah Belanja dan Transfer (51+57)	873.450.161.000,00	804.635.000.321,00	92,12
59	Surplus/Defisit (28-58)	-159.470.075.000,00	-82.396.914.675,00	51,67

60	PEMBIAYAAN			
61	PENERIMAAN DAERAH			
62	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	161.597.900.000,00	161.609.549.676,00	100,0
63	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,0
64	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,0
65	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,0
66	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	2.000.000.000,00	483.865.695,00	24,1
67	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,0
68	Dana Talangan	0,00	0,00	0,0
69	Jumlah Penerimaan Daerah (62 s/d 68)	163.597.900.000,00	162.093.415.371,00	99,0
70	PENGELUARAN DAERAH			
71	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,0
72	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.865.500.000,00	3.865.500.000,00	100,0
73	Pembayaran Pokok Utang	70.700.000,00	70.657.958,00	99,9
74	Pemberian Pinjaman Daerah	41.625.000,00	41.625.000,00	100,0
75	Dana Talangan	0,00	0,00	0,0
76	Pemberian Pinjaman Dana Bergulir	150.000.000,00	0,00	0,0
77	Jumlah Pengeluaran Daerah (71 s/d 76)	4.127.825.000,00	3.977.782.958,00	96,3
78	Pembiayaan Netto (69-77)	159.470.075.000,00	158.115.632.413,00	99,1
79	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) (59+78)	0,00	75.718.717.738,00	0,0



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2010 DAN 2009

(Dalam Rupiah)

Nomor Urut	Uraian	Reff	Jumlah (Rp)		%	Realisasi 2009
			Anggaran Setelah Perubahan 2010	Realisasi 2010		
1	PENDAPATAN	5.1				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.A	56.500.000.000,00	47.017.584.059,00	83,34	49.696.650.709,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.A.a.1	9.635.100.000,00	9.427.005.302,00	97,84	8.116.056.041,00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.A.a.2	26.560.570.000,00	23.935.158.129,00	90,09	23.542.075.234,00
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.A.a.3	2.869.180.000,00	3.222.513.820,00	112,31	2.291.246.882,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.A.a.4	17.427.150.000,00	10.502.906.728,00	60,27	15.746.369.752,00
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.A.b	740.569.483.000,00	743.695.141.382,00	100,42	672.541.434.937,00
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	5.1.A.b.1	635.096.488.000,00	656.795.152.845,00	100,26	621.823.359.884,00
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.A.b.1.a	72.842.089.000,00	78.310.572.814,00	103,37	72.047.434.510,00
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	5.1.A.b.1.b	10.820.635.000,00	10.032.115.931,00	92,71	10.217.531.374,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	5.1.A.b.1.c	487.917.464.000,00	487.917.464.000,00	100,00	487.316.394.000,00
1.2.1.4	Dana Alokasi khusus	5.1.A.b.1.d	32.515.300.000,00	82.615.300.000,00	100,00	52.242.000.000,00
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.1.A.b.2	60.500.165.000,00	61.039.289.200,00	100,89	14.375.625.000,00
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	5.1.A.b.2	-	-	-	-
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	5.1.A.b.2	60.500.165.000,00	61.039.289.200,00	100,89	14.375.625.000,00
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	5.1.A.b.3	24.972.830.000,00	25.830.400.317,00	103,55	36.342.450.050,00
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.A.b.3.a	24.972.830.000,00	25.415.221.988,00	101,77	26.698.250.053,00
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	5.1.A.b.3.b	-	415.178.331,00	-	9.644.200.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.A.c	20.953.454.000,00	18.446.447.000,00	88,04	-
1.3.1	Pendapatan Hibah	5.1.A.c.1	3.000.000.000,00	582.813.000,00	18,75	-
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	5.1.A.c.2	-	-	-	-
1.3.3	Pendapatan Lainnya	5.1.A.c.2	17.953.454.000,00	17.863.634.000,00	99,61	-
	Jumlah		818.022.937.000,00	709.229.173.421,00	86,82	722.236.085.646,00
2	BELANJA	5.1.D				
2.1	BELANJA OPERASI	5.1.D.a	772.248.171.488,00	743.451.499.455,00	96,27	733.757.544.269,00
2.1.1	Belanja Pegawai	5.1.D.a.1	554.656.012.163,00	541.381.534.397,00	97,61	462.694.455.358,00
2.1.2	Belanja Barang	5.1.D.a.2	105.393.929.325,00	95.021.210.889,00	89,73	109.821.645.734,00
2.1.3	Belanja Bunga	5.1.D.a.3	70.000.000,00	55.920.088,00	79,89	61.045.040,00
2.1.4	Belanja Subsidi	5.1.D.a.4	-	-	-	-
2.1.5	Belanja Hibah	5.1.D.a.5	31.861.810.000,00	30.503.632.309,00	95,74	60.728.677.050,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	5.1.D.a.6	29.250.600.000,00	27.383.271.800,00	93,62	32.161.985.587,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	5.1.D.a.7	50.513.800.000,00	49.095.924.192,00	97,19	68.489.755.500,00
2.1.9	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Vertikal Dalam Negeri	5.1.D.a.7	-	-	-	-
2.2	BELANJA MODAL	5.1.D.b	119.795.583.250,00	53.346.801.300,00	44,53	69.802.568.615,00
2.2.1	Belanja Tanah	5.1.D.b.1	1.181.992.800,00	679.930.340,00	57,50	70.240.000,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.D.b.2	34.771.003.730,00	18.358.985.176,00	52,53	20.122.106.400,00
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.D.b.3	33.123.156.320,00	11.330.044,00	32,26	14.592.073.840,00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.D.b.4	27.003.690.900,00	21.631.072.444,00	80,10	33.634.010.975,00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.D.b.5	20.492.343.500,00	330.976.600,00	1,62	1.484.137.400,00
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	5.1.D.b.6	1.023.305.000,00	715.227.500,00	69,89	-
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.D.c	1.681.200.000,00	279.175.000,00	16,61	974.887.437,00
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	5.1.D.c	1.681.200.000,00	279.175.000,00	16,61	974.887.437,00
	Jumlah		893.724.954.738,00	797.077.475.755,00	89,15	804.635.000.321,00

Kode	Uraian	Reff	Jumlah (Rp)		%	Realisasi 2009
			Anggaran Setelah Perubahan 2010	Realisasi 2010		
21	TRANSFER	5.1.B.d	-	-	-	-
21.1	TRANSFER BAGI HASIL KE DESA	5.1.B.d	-	-	-	-
21.1.1	Bagi Hasil Pajak	5.1.B.d	-	-	-	-
21.1.2	Bagi Hasil Retribusi	5.1.B.d	-	-	-	-
21.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.1.B.d	-	-	-	-
	Jumlah		-	-	-	-
	Jumlah Belanja		893.724.954.733,00	737.077.476.755,00	89,19	804.636.000.321,00
	Surplus/(Defisit)		(75.702.017.738,00)	12.161.697.666,00	(16,05)	(62.396.914.675,00)
3	PEMBIAYAAN	5.1.C	-	-	-	-
3.1	PENERIMAAN DAERAH	5.1.C.a	76.918.717.738,00	76.141.996.81,00	98,99	162.093.415.371,00
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	5.1.C.a.1	75.718.717.738,00	75.723.571.733,00	100,01	161.609.549.676,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan		-	-	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah		-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Dana Bergulir	5.1.C.a.2	1.200.000.000,00	418.426.048,00	34,87	463.806.695,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah		-	-	-	-
3.1.7	Dana Talangan		-	-	-	-
	Jumlah		76.918.717.738,00	76.741.996.781,00	98,99	162.793.415.371,00
3.2	PENGELUARAN DAERAH	5.1.C.b	1.216.700.000,00	1.216.957.957,00	99,94	3.977.782.958,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.1.C.b.1	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	100,00	3.805.500.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	5.1.C.b.2	70.700.000,00	70.657.000,00	99,94	70.657.958,00
3.2.4	Pembayaran Utang Pada Pihak Ketiga	5.1.C.b.3	46.000.000,00	46.300.000,00	98,48	41.625.000,00
3.2.5	Dana Talangan		-	-	-	-
3.2.6	Pemberian Pinjaman Dana Bergulir		-	-	-	-
	Jumlah		1.216.700.000,00	1.216.957.957,00	99,94	3.977.782.958,00
	Pembayaran Netto	5.1.C.c	75.702.017.738,00	74.926.038.824,00	98,97	158.116.632.413,00
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	5.1.D	-	87.077.736.490,00	-	75.718.717.738,00



KABUPATEN BLORA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

(Dalam Rupiah)

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan 2011	Realisasi 2011	Rp	%
1	PENDAPATAN	987.415.009.000,00	1.007.775.882.838,00	20.360.873.838,00	102,06
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	58.400.000.000,00	67.021.769.902,00	8.621.769.902,00	114,76
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	10.503.616.000,00	11.177.375.259,00	673.759.259,00	106,41
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	7.774.343.000,00	8.746.660.794,00	972.317.794,00	112,51
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.693.500.000,00	5.884.626.373,00	191.126.373,00	103,36
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	34.428.541.000,00	41.213.107.476,00	6.784.566.476,00	119,71
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	897.032.669.000,00	912.112.701.186,00	15.080.032.186,00	101,68
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana	707.194.841.000,00	712.375.079.294,00	5.180.238.294,00	100,73
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	69.264.319.000,00	74.541.856.590,00	5.277.537.590,00	107,62
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	13.666.413.000,00	13.569.113.704,00	(97.299.296,00)	99,29
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	547.169.709.000,00	547.169.709.000,00	0,00	100,00
1.2.1.4	Dana Alokasi khusus	77.094.400.000,00	77.094.400.000,00	0,00	100,00
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	166.799.485.000,00	166.799.485.080,00	80,00	100,00
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	166.799.485.000,00	166.799.485.080,00	80,00	100,00
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	23.038.343.000,00	32.938.136.812,00	9.899.793.812,00	142,97
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	22.797.343.000,00	32.735.411.044,00	9.938.068.044,00	143,59
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	241.000.000,00	202.725.768,00	(38.274.232,00)	84,12
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	31.982.340.000,00	28.641.411.750,00	(3.340.928.250,00)	89,55
1.3.1	Pendapatan Hibah	1.938.000.000,00	257.071.750,00	(1.680.928.250,00)	13,26
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	30.044.340.000,00	28.384.340.000,00	(1.660.000.000,00)	94,47
	Jumlah	987.415.009.000,00	1.007.775.882.838,00	20.360.873.838,00	102,06

2	BELANJA	1.072.010.045.490,00	925.821.278.064,00	(146.188.767.426,00)	
2.1	BELANJA OPERASI	842.609.486.040,00	818.040.151.153,00	(24.569.334.887,00)	97,08
2.1.1	Belanja Pegawai	625.038.964.340,00	611.532.249.402,00	13.506.714.938,00	97,84
2.1.2	Belanja Barang	131.595.683.700,00	121.745.730.651,00	9.849.953.049,00	92,51
2.1.3	Belanja Bunga	60.000.000,00	44.209.800,00	15.790.200,00	73,68
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Hibah	10.057.598.000,00	9.591.262.000,00	466.336.000,00	95,36
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	33.436.240.000,00	33.137.046.708,00	299.193.292,00	99,11
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	42.421.000.000,00	41.989.652.592,00	431.347.408,00	98,98
2.1.9	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Vertikal Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	BELANJA MODAL	226.667.369.450,00	105.829.479.211,00	(120.837.890.239,00)	46,69
2.2.1	Belanja Tanah	3.879.704.000,00	1.593.643.100,00	(2.286.060.900,00)	41,08

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan 2011	Realisasi 2011	Rp	%
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	49.576.091.750,00	25.091.343.937,00	(24.484.747.813,00)	50,61
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	65.723.234.000,00	34.377.221.794,00	(31.346.012.206,00)	52,31
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	88.071.507.700,00	43.847.419.200,00	(44.224.088.500,00)	49,79
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	19.090.842.000,00	596.271.180,00	(18.494.570.820,00)	3,12
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	325.990.000,00	323.580.000,00	(2.410.000,00)	99,26
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.733.190.000,00	1.951.647.700,00	(781.542.300,00)	71,41
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	2.733.190.000,00	1.951.647.700,00	(781.542.300,00)	71,41
	Jumlah	1.072.010.045.490,00	925.821.278.064,00	(146.188.767.426,00)	86,36
2.4	TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1	TRANSFER BAGI HASIL KE DESA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja	1.072.010.045.490,00	925.821.278.064,00	(146.188.767.426,00)	86,36
	Surplus/(Defisit)	(84.595.036.490,00)	81.954.604.774,00	166.549.641.264,00	(96,88)

3	PEMBIAYAAN				
3.1	PENERIMAAN DAERAH	88.077.736.490,00	87.362.326.902,00	(715.409.588,00)	128,46
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	87.077.736.490,00	87.077.736.490,00	0,00	100,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7	Penerimaan Kembali Dana Bergulir	1.000.000.000,00	284.590.412,00	(715.409.588,00)	28,46
	Jumlah	88.077.736.490,00	87.362.326.902,00	(715.409.588,00)	99,19
3.2	PENGELUARAN DAERAH	3.482.700.000,00	3.482.657.958,00	(42.042,00)	299,94
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah	3.362.000.000,00	3.362.000.000,00	0,00	100,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	70.700.000,00	70.657.958,00	(42.042,00)	99,94
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5	Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00
3.2.6	Dana Talangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.7	Pemberian Pinjaman Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	3.482.700.000,00	3.482.657.958,00	(42.042,00)	100,00
	Pembiayaan Netto	84.595.036.490,00	83.879.668.944,00	(715.367.546,00)	99,15
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0,00	165.834.273.718,00	165.834.273.718,00	0,00

BUPATI BLORA,

TTD